



Laporan Penelitian

**Kebutuhan Pengembangan
Usaha Kakao dengan
Pendekatan Rantai Nilai
&
Evaluasi Gerakan Nasional
Peningkatan dan Mutu Kakao
(GERNAS KAKAO)**

**Studi Kasus Kabupaten Majene,
Sulawesi Barat**



FORDFOUNDATION

LAPORAN PENELITIAN

Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai

KERJASAMA ANTARA:

FORD FOUNDATION

dengan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jakarta 2013

Tim Peneliti KPPOD:

Boedi Rheza
Elizabeth Karlinda

2013



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar, Tabel dan Grafik	ii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Studi	2
1.4. Manfaat Studi	2
II. Kerangka Pikir	2
III. Metodologi Studi	2
3.1. Pendekatan Studi	2
3.2. Lokasi Studi	2
3.3. Jenis dan Sumber Data	3
3.4. Metode Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden	3
3.5. Metode Analisis	3
IV. Hasil dan Pembahasan	4
4.1. Gambaran Umum Usaha Kakao di Majene	4
4.2. Rantai Nilai Usaha Kakao di Majene	5
4.2.1. Rantai Nilai Sarana Produksi (Saprodi)	5
4.2.2. Budidaya atau Usaha Perkebunan	7
4.2.3. Pemanenan dan Pengolahan atau Pasca Panen	10
4.2.4. Distribusi dan Pemasaran	11
4.3. Rencana Ke Depan Pemerintah Kabupaten Majene	13
V. Penutup	14
Lampiran I. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Majene	15
Lampiran II. Matriks Analisis <i>Stakeholders</i> Pengembangan Kakao di Kabupaten Majene	18

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

Gambar 1.	Kerangka Pemikiran Studi	3
Gambar 2.	Rencana Susunan Organisasi Petani Kabupaten Majene	13
Tabel 1.	Luas Area, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kakao Setiap Kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2011	4
Grafik 1.	Value Chain Perdagangan Kakao di Kabupaten Majene	6

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkebunan merupakan subsektor pertanian yang strategis dan menjadi salah satu andalan perekonomian Indonesia. Diantara sejumlah subsektor pertanian lainnya, subsektor ini memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sekitar 17.85% per tahun (BPS, 2012). Peran subsektor perkebunan sebenarnya lebih besar karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor industri yang menjadi subsistem tengah dan hilir sehingga berpotensi meningkatkan nilai tambah. Dengan adanya keterkaitan ini, dan potensi peningkatan nilai tambah, subsektor perkebunan dapat menjadi salah satu subsektor untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, pangan dan perekonomian daerah. Peran penting lain adalah sebagai basis pengembangan ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Salah satu komoditas andalan di sektor perkebunan adalah kakao. Indonesia merupakan produsen kakao nomor dua di dunia dengan produksi 809.583 ton, setelah Pantai Gading yang produksinya 1.223.150 ton (FAO). Dengan produksi sebesar itu, komoditi ini telah menyumbangkan devisa sebesar US \$ 1.4 Milyar pada tahun 2009 yang merupakan perolehan devisa ketiga terbesar di sektor perkebunan setelah komoditas kelapa sawit dan karet. Selama tahun 1998 hingga 2011, luas areal perkebunan kakao tercatat mengalami peningkatan sebesar 9% per tahun. Dari 1.746 juta hektar luas areal perkebunan kakao, 94% dikelola oleh rakyat, selebihnya 3.1% dikelola pemerintah dan 2,9% oleh perkebunan besar swasta. (Ditjenbun, 2012).

Salah satu sentra produksi kakao di Indonesia adalah Sulawesi Barat. Di propinsi hasil pemekaran dari Propinsi Sulawesi Selatan ini, kakao menjadi komoditas unggulan karena selain memberi kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Luas area tanaman kakao di Sulawesi Barat mencapai 194.281 ha dengan total produksi sebesar 122.256 ton pada tahun 2011 (Statistik Perkebunan 2012). Salah satu lokasi sentra budidaya kakao di Sulawesi Barat adalah Kabupaten Majene. Kabupaten di pesisir barat Sulawesi ini memiliki luas wilayah 947.84 km² dan jumlah penduduk (tahun 2009) sebanyak 153.743 jiwa yang tersebar pada 8 kecamatan. Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2010, luas lahan pertanaman kakao rakyat di Kabupaten Majene seluas 11.251 Ha yang melibatkan petani sebanyak 7.771 Kepala Keluarga (KK).

Kontribusi kakao dalam PDRB Kab. Majene merupakan kontribusi subsektor yang paling besar yakni sebesar 20% terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Majene. Saat ini, budidaya dan perkebunan kakao seluruhnya masih dikelola oleh petani lokal dengan mayoritas status lahan adalah milik sendiri. Hal ini dikarenakan, usaha budidaya kakao umumnya merupakan usaha turun temurun dari keluarga petani kakao. Perusahaan skala menengah sampai besar belum ada yang masuk ke sektor ini.

Dalam tata niaga kakao di Majene, peran terbesar dilakukan oleh pedagang mulai dari pedagang kecil sampai dengan pedagang kabupaten. Belum banyak petani yang juga memainkan peran sebagai pedagang dalam rantai perdagangan kakao di Majene. Tingkat harga yang digunakan dalam perdagangan kakao mengacu pada tingkat harga yang ditetapkan oleh kedua pasar besar komoditas kakao yaitu di New York dan London. Dari sisi permintaan pasar, pedagang cenderung mengambil biji kakao yang masih diproses asalan dari petani, untuk kemudian diproses kembali dalam bentuk fermentasi ataupun pengeringan sampai pada kadar yang lebih baik. Bagi prosesor atau pengolah, kualitas yang diinginkan adalah fermentasi.

Posisi petani dalam rantai perdagangan kakao di Majene juga tidak terlalu kuat. Sebagai pihak yang melakukan budidaya, petani cenderung mendapatkan harga yang tidak tinggi. Hal ini dikarenakan sifat petani sebagai penerima harga (*price taker*) dalam rantai perdagangan kakao. Penyebabnya adalah ketidakmampuan dan kurangnya motivasi petani dalam melakukan perawatan kebun, rendahnya produktivitas petani, dan lainnya.

Kondisi ini diperberat dengan kelembagaan institusi petani yang lemah. Institusi petani dalam bentuk kelompok tani di Majene cukup banyak, namun hanya sekitar 10% saja yang benar-benar berfungsi sebagai kelompok tani. Mayoritas kelompok tani yang tidak menjalankan fungsinya dikarenakan motif dari pendiriannya yang hanya mengejar keuntungan melalui adanya proyek pemerintah. Kelompok tani yang ada juga masih bersifat baru, sehingga belum dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai tempat penguatan kapasitas petani.

Melihat hal tersebut. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memandang perlu melakukan kajian terkait usaha kakao di Kabupaten Majene. Kajian ini dilakukan untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap mata rantai usaha kakao di Majene. Hal

ini dilakukan agar didapat sebuah baseline untuk pemecahan masalah-masalah yang terjadi pada kakao sebagai komoditas utama di Majene.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari studi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran umum usaha kakao di Majene?
- 2) Bagaimana permasalahan setiap rantai nilai usaha kakao di Majene?
- 3) Apakah akar masalah dari usaha kakao Majene?
- 4) Bagaimana rencana tindak lanjut pengembangan iklim usaha bagi peningkatan rantai nilai usaha kakao di Majene?

1.3. TUJUAN STUDI

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan gambaran umum kakao di Kabupaten Majene;
- 2) Menganalisis permasalahan yang terjadi pada setiap rantai nilai usaha kakao di Kabupaten Majene;
- 3) Menjadi baseline atau dasar bagi rencana tindak lanjut untuk pemecahan permasalahan rantai nilai usaha kakao di Majene ke depan dan pengembangan iklim usaha kakao.

1.4. MANFAAT STUDI

Hasil studi ini diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai permasalahan dan analisis stakeholder di setiap rantai nilai kakao di Majene. Harapannya, hasil studi ini menjadi masukan kebijakan yang memadai untuk mengatasi permasalahan kakao untuk meningkatkan produktivitas kakao di Majene. Selain itu, studi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi titik-titik penting bagi penguatan kapasitas pelaksanaan di lapangan dalam kerangka pengembangan iklim usaha bagi peningkatan rantai nilai usaha secara operasional.

II. KERANGKA PIKIR

Sebagai sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat Kabupaten Majene, berkebun kakao seyogyanya dapat menjadi penopang kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Namun kenyataannya, usaha kakao belum memberikan keuntungan yang optimal bagi para petani kakao. Beberapa penyebabnya adalah ini adalah kurang optimalnya produktivitas, posisi tawar petani yang masih lemah dalam rantai nilai perdagangan dan beberapa hal lainnya. Hal ini dikarenakan, petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat di dalam rantai perdagangan kakao di Kabupaten Majene. Rendahnya posisi tawar ini diakibatkan beberapa hal seperti kebanyakan pedagang pengepul yang

membeli langsung kepada petani, produktivitas petani masih rendah, dan masih belum efisiennya rantai perdagangan kakao.

Untuk mengoptimalkan peran petani kakao dan meningkatkan posisi tawar petani kakao, diperlukan analisis rantai nilai usaha kakao di Majene. Rantai nilai merupakan aktifitas yang berawal dari bahan mentah sampai dengan penanganan purna jual. Rantai nilai ini mencakup aktivitas yang terjadi karena hubungan dengan pemasok (*Supplier Linkages*) dan hubungan dengan konsumen (*Customer Linkages*). Analisis rantai nilai ini perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki dan mengefisienkan setiap rantai nilai usaha kakao di daerah tersebut sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Majene.

Untuk mendukung analisis rantai nilai tersebut, diperlukan juga analisis *stakeholder* yang menggambarkan peran masing-masing *stakeholder* pada setiap rantai nilai. Dengan analisis *stakeholder* tersebut, akan terlihat peran *stakeholder* yang masih perlu ditingkatkan pada setiap rantai nilai kakao. Dari analisis ini diharapkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja para *stakeholder* pada setiap rantai nilai usaha kakao di Majene. Analisis rantai nilai yang dilakukan bersifat lebih pada pemetaan permasalahan dan tidak menyentuh sampai ke hal-hal teknis untuk setiap mata rantai nilai usaha kakao di Majene.

III. METODOLOGI STUDI

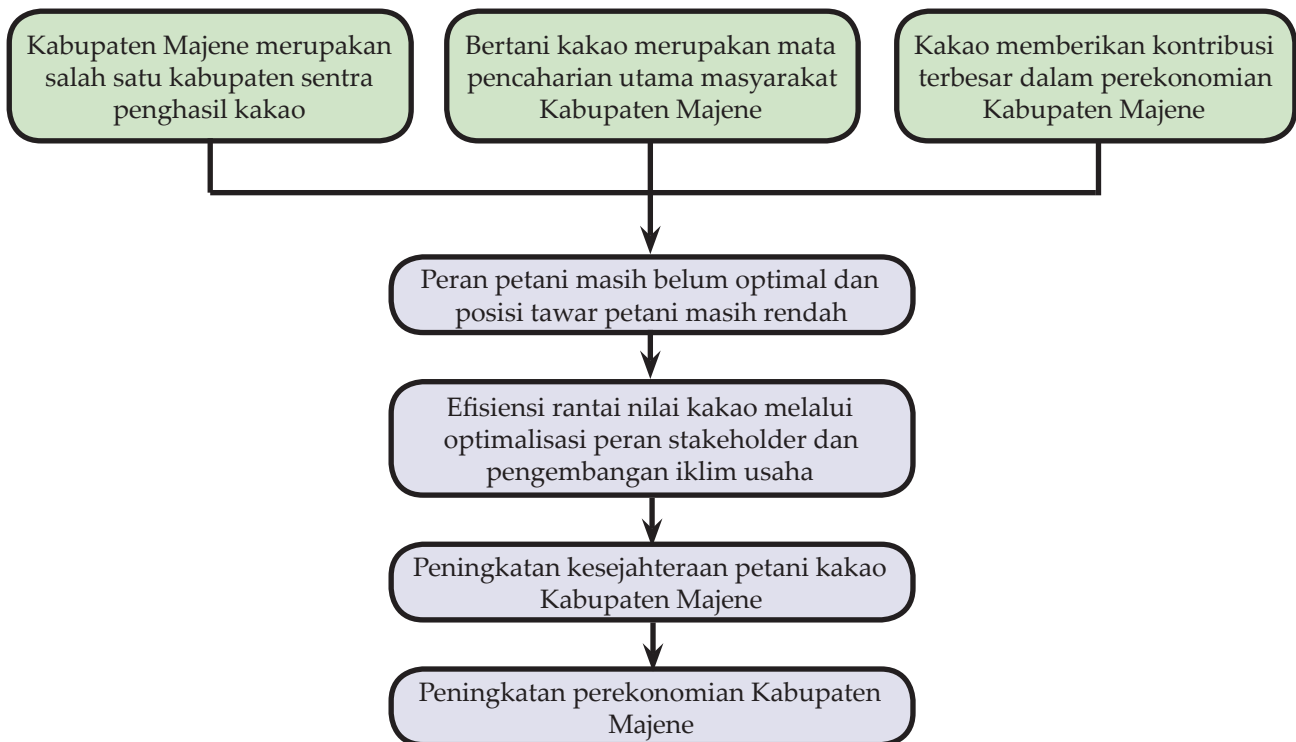
3.1. PENDEKATAN STUDI

Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat untuk menggali informasi – informasi mendalam tentang rantai nilai usaha kakao di Majene, mulai dari rantai nilai input sampai dengan rantai nilai pemasaran. Dengan pendekatan demikian diharapkan secara induktif akan terbentuk interpretasi dan pemahaman makna rantai nilai kakao dan masalah pengembangan iklim usaha maupun interaksi antar stakeholder yang terlibat. Untuk maksud itu pula, penelitian ini bertipikal deskriptif: menggambarkan dan menjelaskan secara analitis mengapa dan bagaimana pola-pola masalah terjadi

3.2. LOKASI STUDI

Studi ini dilaksanakan di Kabupaten Majene, khususnya di tiga kecamatan yang menjadi sentra kakao yaitu Kecamatan Tubo, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Malunda. Walaupun berfokus di Kabupaten Majene, lokasi studi ini juga dilakukan hingga Polewali Mandar guna melihat mata rantai pemasaran kakao di Majene, serta di Jakarta yang melibatkan stakeholders kakao di tingkat nasional.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Studi



3.3. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei/wawancara dan focus group discussion (FGD) dengan stakeholders kakao di Kabupaten Majene. Selain di daerah, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui wawancara dan FGD dengan para stakeholders kakao di tingkat nasional. Sebagai pendukung dari data primer, juga dikumpulkan data sekunder tentang perkebunan kakao maupun pelaksanaan GERNAS yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, Badan Pusat Statistik Majene, Kementerian Pertanian serta dari lembaga/instansi lainnya.

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA DAN PEMILIHAN RESPONDEN

Pengumpulan data primer dalam studi ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

- 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap latar dan objek penelitian.
- 2) Wawancara mendalam (*Indepth Interview*), yaitu dilakukan melalui wawancara mendalam kepada narasumber terpilih atau para *stakeholder* usaha kakao di Kabupaten Majene dan di tingkat nasional.
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* kakao di Kabupaten Majene, maupun FGD yang melibatkan *stakeholders* kakao di tingkat Nasional.

Pemilihan narasumber dalam studi ini berdasar *purposive sampling*, di mana pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan jenis informasi atau pertimbangan yang sudah ada/ditetapkan sebelumnya dan adanya identifikasi atas kelompok/orang yang memiliki kualifikasi tertentu (terkait jabatan, kepakaran/ *expert sampling*, dan pengalaman dalam usaha kakao). Namun di lapangan, sebagai bagian dari metode *purposive sampling* adalah dimungkinkan dan bahkan didorong untuk pengembangan kategori/subjek narasumber lain berdasarkan teknik *snowballing* (berdasarkan keterkaitan informasi, rekomendasi nama, dst).

Bertolak dari teknik tersebut, narasumber yang diwawancarai merupakan stakeholders kakao yang terkait langsung dengan rantai nilai kakao di Kabupaten Majene yakni petani, pengepul tingkat desa/kecamatan, pengepul besar, penyedia sarana produksi, penyuluh serta Pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Majene dan pejabat SKPD terkait.

3.5. METODE ANALISIS

Untuk menjawab rumusan permasalahan, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan metode analisis rantai nilai. Porter (2001), mendefinisikan Analisis Rantai Nilai (*Value Chain Analysis*) sebagai alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk suatu produk. Rantai nilai ini berasal dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan, mulai dari bahan baku dari pemasok hingga produk

akhir sampai ke tangan konsumen, termasuk juga pelayanan purna jual. Tujuan dari analisis rantai nilai adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap rantai nilai dimana pelaku rantai nilai dapat meningkatkan nilai produk untuk konsumen atau menurunkan biaya dan mengefisienkan kerja. Penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah (*value added*) dapat membuat suatu usaha atau industri lebih kompetitif.

Berdasarkan analisa rantai nilai, terdapat dua aktivitas bisnis, yakni aktivitas utama (*primary activities*) dan aktivitas pendukung (*support activities*). Aktivitas utama adalah semua aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan penambahan nilai terhadap masukan-masukan dan mentransformasikannya menjadi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Aktivitas ini meliputi: *inbound logistics*, operasi, *outbound logistics*, pelayanan, pemasaran dan penjualan. Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang mendukung atau memungkinkan semua aktivitas utama berfungsi dengan efektif. Aktivitas pendukung ini meliputi: infrastruktur, sumberdaya manusia, dan iptek.

Analisis rantai nilai kakao yang dilakukan dalam studi ini hanya terbatas pada pemetaan masalah yang ada pada masing-masing rantai nilai usaha kakao di Majene. Tidak sampai kepada analisis efisiensi di setiap mata rantai nilai usaha kakao di Majene. Dengan pemetaan masalah ini, diharapkan dapat dianalisis satu titik unkit yang dapat dijadikan pemecahan bagi pengembangan rantai nilai usaha kakao di Majene.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM USAHA KAKAO DI MAJENE

Kakao menjadi pilihan utama yang dikembangkan di Kabupaten Majene karena komoditas ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan masyarakat dan banyak menyerap tenaga kerja di daerah tersebut. Pada tahun 2010, sektor pertanian adalah penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Majene yakni mencapai 51%, dimana 39% dari PDRB sektor pertanian berasal dari subsektor perkebunan (Majene dalam Angka 2012).

Tiga kecamatan yang menjadi sentra produksi kakao di Majene, yakni Kecamatan Tammeroddo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Luas areal kakao di tiga kecamatan tersebut berturut-turut pada tahun 2011 adalah 3.346 ha, 2.284 ha, dan 796 ha. Total produksi kakao ketiga kecamatan tersebut pun mencapai 91% dari total produksi kakao di Kabupaten Majene. Sementara Kecamatan Malunda merupakan kecamatan dengan produktivitas dan jumlah petani kakao tertinggi. Produktivitasnya mencapai 940 kg/ha dengan jumlah petani sebanyak 2.225 KK. Sebaran kakao di Majene dapat dilihat di tabel 1 dibawah ini.

Kondisi infrastruktur pendukung seperti jalan, juga belum memadai. Jalan dengan kualitas baik, kebanyakan berada di ibukota Kab. Majene. Infrastruktur jalan dari dan ke pusat produksi kakao, bisa dibilang masih kurang. Hal ini dapat

Tabel 1. Luas Area, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kakao Setiap Kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2011

No	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)				PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH PETANI (KK)
		TBM	TM	TTM/TR	TOTAL			
1	Tammeroddo Sendana	378	2.888	80	3.346	2.298	796	1.629
2	Malunda	311	2.429	159	2.899	2.284	940	2.225
3	Ulumanda	243	1.113	65	1.421	796	715	1.226
4	Tube Sendana	233	1.064	53	1.350	579	544	543
5	Sendana	172	1.039	18	1.229	532	512	1.024
6	Pamboang	120	687	51	858	239	348	358
7	Banggae Timur	152	638	15	805	218	342	525
8	Banggae	91	396	17	504	138	348	181
Jumlah		1.700	10.254	458	12.412	7.084	4.545	7.711

Sumber: Statistik Perkebunan Majene, 2012

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
 TM = Tanaman Menghasilkan
 TTM / TR = Tanaman Tidak Menghasilkan/Ananam Rusak

menghambat arus distribusi produk kakao untuk pemasarannya. Selain itu, beban biaya transportasi yang harus dikeluarkan petani juga cukup besar karena buruknya infrastruktur ini.

4.2. RANTAI NILAI USAHA KAKAO DI MAJENE

Mata rantai usaha kakao di Majene terdiri dari sekurangnya empat mata rantai yaitu rantai nilai penyedia input, rantai nilai budidaya kakao, rantai nilai pengolahan dan terakhir adalah rantai nilai perdagangan. Keseluruhan rantai nilai yang akan dikaji dalam studi ini adalah rantai nilai usaha kakao saja, dan tidak termasuk rantai nilai pengolahan coklat maupun produk-produk olahan coklat seperti kosmetik dan makanan.

Untuk melihat secara detail mengenai rantai nilai usaha kakao di Kabupaten Majene, dapat dilihat dari grafik 1 di halaman selanjutnya:

4.2.1. RANTAI NILAI SARANA PRODUKSI (SAPRODI)

Rantai nilai paling belakang dari usaha kakao di Majene adalah rantai nilai sarana produksi. Rantai nilai sarana produksi ini merupakan rantai nilai input bagi rantai nilai usaha kakao di Majene. Saprodi ini terdiri dari sarana untuk memulai bertani, perawatan, sampai pemanenan seperti cangkul, bibit dan pupuk. Saprodi untuk perawatan atau pemeliharaan adalah seperti gunting pangkas, pupuk, pestisida. Sementara untuk pemanenan, saprodi yang digunakan adalah gunting potong.

Di rantai nilai saprodi, terdapat beberapa stakeholder yang berperan seperti pedagang saprodi, UPH, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Organisasi Non Pemerintah (NGO). *Stakeholder* yang paling berperan dalam rantai saprodi adalah pedagang saprodi, baik eceran maupun grosir, dan UPH. Dua *stakeholder* ini yang berinteraksi langsung dengan petani dalam penyediaan saprodi seperti pupuk, bibit, pestisida dan alat pertanian di lapangan. Sedangkan pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah berperan dalam menyediakan pasokan pupuk, benih dan pestisida melalui program-program bantuan kepada para petani. Di Majene, ada juga Organisasi Non Pemerintah yang pernah memberikan bantuan peralatan berupa gunting pangkas.

Untuk memperoleh saprodi yang dibutuhkan, petani umumnya membeli langsung kepada pedagang saprodi di tingkat desa maupun kecamatan. Jika saprodi yang dibutuhkan tidak tersedia, maka petani bisa membeli melalui pedagang grosir di Polewali Mandar. Ada beberapa keuntungan yang didapat oleh petani jika melakukan pembelian grosir ini, seperti pembelian yang dilakukan dapat mempermurah

biaya angkut, adanya harga yang lebih murah, dan lainnya.

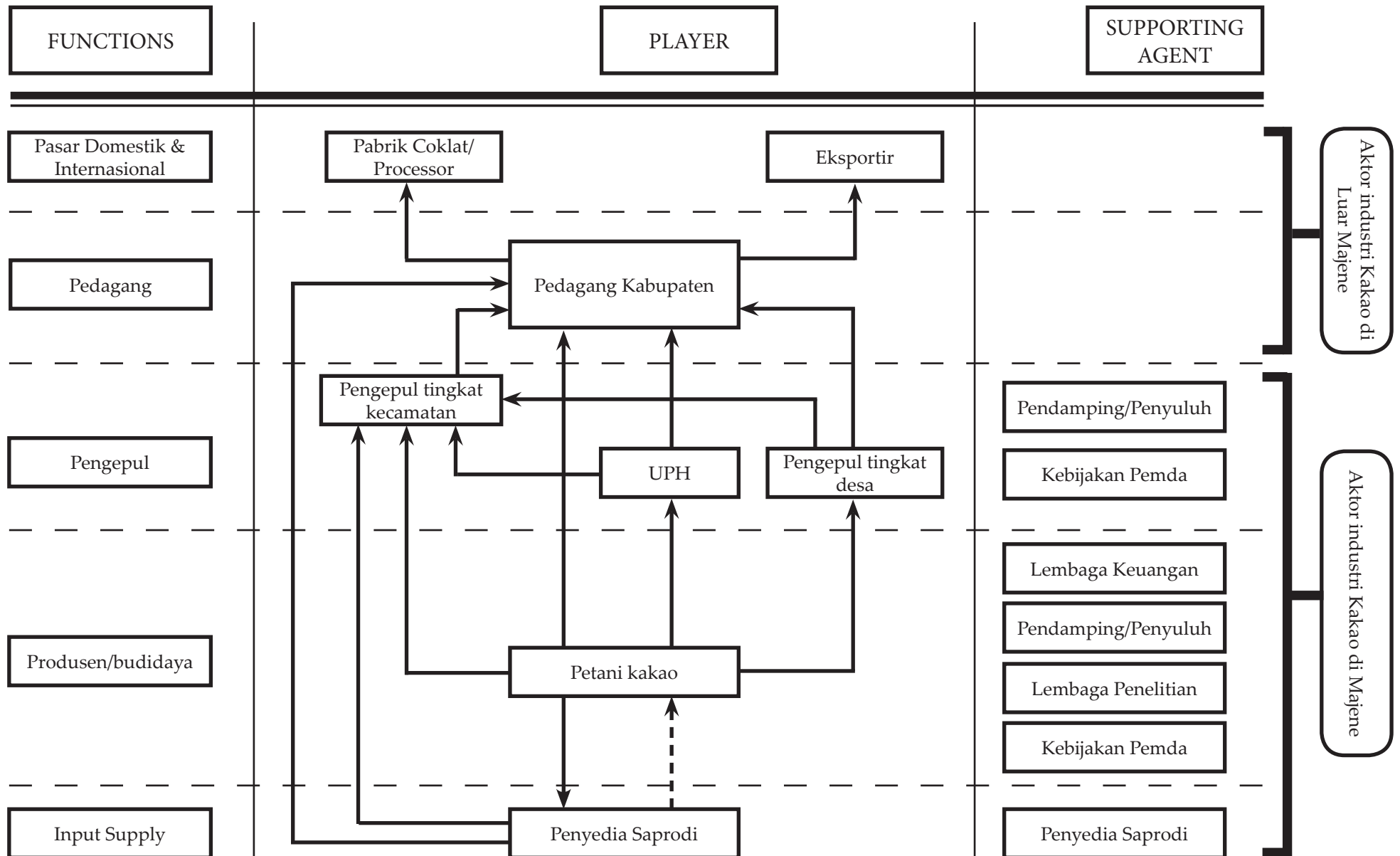
Selain melalui pedagang eceran dan grosir, petani kakao dapat membeli saprodi melalui Unit Pengolahan Hasil (UPH). Di Majene, sudah terdapat 4 UPH yang berdiri melalui bantuan program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (GERNAS Kakao). UPH ini kemudian dikelola oleh kelompok tani (poktan) andalan. Pembelian saprodi melalui UPH harganya relatif tidak berbeda dibandingkan dengan pedagang eceran. Namun ada keuntungan tersendiri bagi anggota poktan yang mengelola UPH, karena adanya harga yang berbeda (lebih murah) dibandingkan dengan harga yang dikenakan pada non anggota poktan.

Menurut narasumber di daerah, bantuan yang diterima melalui kegiatan GERNAS Kakao, adalah pestisida dengan merk 'Vigor' dengan dosis 0,5 liter/hektar, pupuk dengan dosis 40 kg/hektar dan *handsprayer* dengan rasio 0,2 unit/hektar. Paket bantuan sarana produksi yang diberikan melalui kegiatan rehabilitasi adalah entres dan sambung samping sebanyak 2.000/hektar, pestisida dengan dosis 0,3 liter/hektar, pupuk dengan dosis 290 kg/hektar dan *handsprayer* dengan rasio 0,2 unit/hektar. Sementara dalam kegiatan intensifikasi, bantuan yang diberikan adalah pestisida dengan merk 'Matarin' dengan dosis 0,8 liter/hektar, pupuk dengan dosis 320 kg/hektar dan *handsprayer* dengan rasio 0,2 unit/hektar.

Pupuk yang diberikan dalam program GERNAS ini ternyata tidak dijual bebas di pasaran. Hal ini dikarenakan pupuk tersebut memiliki formula khusus yang berbeda dengan pupuk yang dijual umum. Hal ini terlihat dari dampak penggunaan pupuk pada tanaman kakao. Jika memakai pupuk ini, maka buah kakao dalam yang dihasilkan dalam satu pohon lebih banyak dibandingkan hasil pemakaian pupuk biasa. Selain itu, Pupuk ini dibutuhkan oleh petani, terutama petani yang telah mengikuti program GERNAS, untuk menjaga kesinambungan produktivitas kakao yang dihasilkan dari bibit GERNAS.

Permasalahan yang terjadi pada rantai saprodi adalah masih banyaknya petani yang membeli pupuk dan pestisida secara kredit kepada para pedagang sarana produksi yang sekaligus sebagai pedagang pengepul. Sistem tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan petani secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan perawatan kebun kakaonya. Dengan sistem ini, pada saat pemupukan, petani yang belum mempunyai anggaran untuk membeli pupuk dan pestisida dapat berhutang kepada pedagang. Hutang tersebut kemudian akan dilunasi pada saat musim panen dengan membayar uang tunai atau dengan biji kakao. Kondisi tersebut memaksa petani 'harus' menjual biji kakaonya ke pedagang pengepul yang telah memberikan mereka kredit pupuk dan pestisida.

Grafik 1. Value Chain Perdagangan Kakao di Majene



Dengan demikian, petani tidak mempunyai pilihan untuk menjual biji kakao ke pihak lain yang lebih menguntungkan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka petani akan terus berada pada kondisi yang kurang menguntungkan dan hanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*) biji kakao.

Dari sisi modal usaha, sangat diharapkan dukungan dari lembaga keuangan. Di Majene, belum banyak petani memanfaatkan peran perbankan untuk pengembangan budidaya kakao terutama dari sisi permodalan. Permodalan yang dimaksud adalah kredit untuk pengembangan usaha kakao. Saat ini masih sedikit petani kakao yang mengajukan kredit kepada pihak perbankan. Dari hasil studi lapangan, ditemukan bahwa keengganan petani untuk mengajukan kredit dikarenakan petani merasa persyaratan masih berbelit-belit dan tidak mudah prosesnya. Khusus untuk permodalan, ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana revitalisasi yang disimpan di perbankan. Dana revitalisasi ini dapat dipakai oleh petani untuk membantu meningkatkan kapasitas modal dalam bentuk kredit. Permasalahan yang muncul dari penggunaan dana revitalisasi ini adalah pihak perbankan di Majene tidak memiliki petugas teknis untuk melakukan pengurusan administrasi permohonan kredit. Hal ini menyulitkan petani untuk mengakses dana tersebut. Jika petani dapat mengakses dana revitalisasi ini, petani dapat memiliki kekuatan dalam hal permodalan, sehingga tidak perlu lagi kesulitan untuk membeli saprodi.

Luas dan sebaran wilayah budidaya kakao di Majene juga berdampak pada proses distribusi saprodi. Wilayah Majene terdiri dari daerah pesisir dan juga perbukitan. Untuk mendistribusikan saprodi ke wilayah-wilayah yang terletak pada perbukitan masih sulit, memerlukan moda transportasi dan jalur distribusi yang panjang. Kualitas infrastruktur jalan yang kurang baik juga menyulitkan distribusi saprodi. Pada akhirnya, untuk mendistribusikan saprodi memerlukan biaya transportasi yang tidak sedikit, dan mengakibatkan harga saprodi menjadi ikut naik bagi petani yang khusus berada di perbukitan.

Pihak universitas juga belum begitu berperan dalam penelitian untuk saprodi. Lembaga penelitian di Universitas semestinya dapat menghasilkan formula tertentu untuk sarana produksi yang diperlukan dalam budidaya kakao. Seperti yang diketahui, pupuk dari GERNAS kakao yang dibutuhkan memiliki kualifikasi khusus. Dengan adanya kualifikasi khusus tersebut, tentunya diperhatikan mengenai keadaan tanah. Dengan adanya penelitian tanah ini, penyediaan saprodi tentunya bisa lebih tepat guna bagi para petani kakao di Majene. Namun sayangnya universitas yang ada di sana, belum mampu untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan saprodi yang sesuai dengan karakteristik iklim dan tanah di Kabupaten Majene.

4.2.2. BUDIDAYA/ USAHA PERKEBUNAN

Dalam rantai nilai budidaya, posisi sentral adalah kegiatan-kegiatan *on farm* maupun petani sebagai aktor utama. Kegiatan *on farm* antara lain perawatan kebun seperti penyemprotan pestisida, pemangkasan, pemupukan sampai pada pemanenan kakao. *Stakeholder* lain di dalam rantai budidaya ini adalah Pemda, tenaga pendamping, dan juga kelompok tani. Terdapat beberapa aspek dalam rantai nilai budidaya ini, yaitu:

A. PRODUKSI

Produksi kakao di Majene telah dilakukan turun-temurun. Selain itu, rata-rata petani memiliki sendiri lahan pertaniannya, dengan rata-rata 1-2 hektar tiap petani. Produktivitas kebun kakao saat ini di Majene rata-rata sekitar 0.95 ton/ha/tahun. Tingkat produktivitas ini masih jauh dari tingkat optimal produktivitas kakao yang dapat mencapai 3 ton/ha/tahun. Budidaya kakao dilakukan melalui proses penanaman, perawatan sampai pemanenan. Umumnya kebun kakao akan menghasilkan setelah 3 tahun penanaman dengan menggunakan bibit yang biasa digunakan petani. Sedangkan jika menggunakan metode sambung samping, pemanenan bisa dilakukan kurang lebih 1.5 tahun setelah dilakukan sambung samping. Setelah penanaman dilakukan, tahapan selanjutnya adalah perawatan kebun yang terdiri dari pemangkasan, sampai pemanenan.

Tujuan dilakukannya perawatan kebun, seperti pemangkasan, pemupukan, pemanenan yang berkala, serta pengelolaan sanitasi, adalah meminimalisasi terjadinya serangan hama maupun penyakit kakao. Serangan hama kakao di Majene masih di dominasi oleh hama PBK, sedangkan penyakit kakao umumnya terjadi busuk buah dan jamur. Serangan busuk buah dan jamur sering terjadi pada musim hujan. Pemangkasan dilakukan untuk merapikan bentuk pohon kakao, agar tidak terlalu banyak cabang dan pohon menjadi tinggi. Ini memudahkan perkembangan buah kakao, maupun pada saat pemanenan nantinya. Pemupukan dilakukan setiap dua kali dalam setahun. Selain pemupukan, untuk meminimalisir serangan hama tadi, juga dilakukan penyemprotan pestisida. Penyemprotan pestisida ini dilakukan setiap 7-10 hari sekali.

Pada praktiknya, dalam melakukan perawatan kebun dengan luas rata-rata 1-2 hektar, biasanya petani di Majene dibantu oleh orang lain, baik tenaga buruh, atau tenaga petani lain (anggota dalam poktannya) yang memang mempunyai sistem gotong royong dalam berkebun. Tenaga buruh biasanya dibayar sebesar Rp 250.000/orang untuk sekali pengerjaan pemupukan, penyemprotan pestisida serta pemangkasan ranting pohon untuk setiap kebun. Sementara dalam sistem gotong royong, pengerjaan perawatan kebun dilakukan bersama-sama dan

kebun yang dirawat bergantian. Gotong-royong dalam perawatan kebun ini biasanya dilakukan oleh kelompok tani.

Di Majene petani yang sudah rutin melakukan perawatan secara teratur umumnya adalah petani andalan. Dampaknya adalah petani andalan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan petani non andalan. Petani-petani yang belum melakukan perawatan kebun secara intensif dan berkala umumnya tidak memiliki motivasi dan pengetahuan yang cukup dalam berkebun. Selain permasalahan tersebut, kurangnya kekuatan permodalan petani juga menjadi salah satu kendala yang membuat petani kurang merawat kebunnya.

Seperti yang telah disebutkan diatas, masalah budidaya kakao bukan hanya serangan hama, namun juga penyakit seperti busuk buah dan jamur. Cara yang dilakukan petani untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui perawatan kebun seperti menjaga sanitasi kebun melalui pembersihan kebun, pemangkasan kebun dan fungisida secara teratur. Pemangkasan dilakukan agar sinar matahari dapat masuk sehingga tingkat kelembaban di kebun kakao tidak terlalu tinggi yang dapat menyebabkan busuk buah.

Untuk menjaga produktivitas, Pemda dan penyuluh lapangan juga berperan serta. Peran pemda dan penyuluh sangat besar dalam memberikan motivasi dan pengetahuan kepada petani. Penyuluhan yang diberikan kepada petani dilakukan di masing-masing desa. Saat ini kondisi penyuluh di Kab. Majene masih kurang dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah ideal penyuluh yaitu satu penyuluh untuk setiap desa belum tercapai karena jumlah penyuluh yang tidak memadai. Selain itu, dari segi kapasitas, rata-rata penyuluh juga tidak memiliki latar belakang perkebunan, melainkan tanaman pangan, sehingga terkadang petani kakao yang "mengajari" penyuluh ketika dilakukan penyuluhan lapangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh penyuluh tidak hanya kuantitas maupun kualitas. Masalah Kelembagaan juga menjadi penyebab, penyuluhan tidak optimal. Saat ini kelembagaan yang menaungi penyuluh adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Nomenklatur kelembagaan ini membuat penyuluh tidak dapat menjalankan tugas penyuluhan secara optimal karena tidak ada anggaran khusus bagi operasional penyuluh perkebunan. Hal ini dikarenakan, anggaran yang ada lebih fokus kepada penyuluhan pertanian tanaman pangan. Keterbatasan anggaran ini juga menyebabkan tugas penyuluhan petani kakao menjadi lebih sulit karena dukungan dana operasional yang minim.

Dari sisi dukungan kebijakan, belum ada kebijakan yang menyentuh langsung kepada usaha kakao.

Kebijakan yang terkait kakao adalah perda SOTK yang mengatur tentang kelembagaan penyuluh, dan juga perda-perda APBD. Dengan tidak adanya kebijakan yang mengatur khusus atau bersentuhan langsung dengan usaha kakao, maka pengembangan pun tidak dapat dilakukan secara optimal. Padahal instrumen kebijakan seperti perda dapat digunakan sebagai insentif atau payung hukum bagi pengembangan usaha kakao, terutama untuk budidaya. Jika kebijakan pengembangan kakao, khususnya untuk rantai nilai budi daya ini dapat teroptimalkan, dapat mendorong budi daya kakao di Majene lebih terarah dan lebih terpolo dalam mencapai target peningkatan produktivitas.

B. KELEMBAGAAN

Di rantai nilai produksi, terdapat beberapa kelembagaan, seperti kelembagaan dalam pengelolaan kebun, kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani. Kelembagaan pengelolaan kebun seperti dilakukan perawatan secara gotong royong dengan anggota kelompok tani. Sedangkan kelembagaan yang berbentuk organisasi adalah kelompok tani. Kelompok tani pada prinsipnya berfungsi sebagai wadah belajar petani kakao, forum diskusi petani kakao, dan juga wadah untuk melakukan advokasi kebijakan petani kakao. Di Majene, umumnya kelompok tani terbentuk atas inisiasi dari para petani. Namun kondisi saat ini, mayoritas kelompok tani yang terdaftar sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini dikarenakan kelompok tani berdiri hanya untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Meskipun ada kelompok tani yang benar-benar bertujuan untuk memajukan anggota kelompoknya.

Kelembagaan lain yang terbentuk di dalam rantai nilai produksi berbentuk koperasi pertanian. Koperasi pertanian ini berfungsi sebagai wadah untuk menjalankan fungsi pendukung aktivitas usaha tani kakao di Majene. Namun koperasi pertanian yang dahulu pernah berdiri pun kini sudah tidak berfungsi secara optimal untuk mendukung aktifitas petani. Hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi. Terjadinya penyalahgunaan ini menyebabkan ketidakpercayaan petani kakao terhadap keberadaan koperasi saat ini, karena ditakutkan akan terjadi lagi penyalahgunaan keuangan seperti sebelumnya.

Kelembagaan lain yang terbentuk di dalam rantai nilai produksi berbentuk koperasi pertanian. Koperasi pertanian ini berfungsi sebagai wadah untuk menjalankan fungsi pendukung aktivitas usaha tani kakao di Majene. Namun koperasi pertanian yang dahulu pernah berdiri pun kini sudah tidak berfungsi secara optimal untuk mendukung aktifitas petani. Hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi. Terjadinya penyalahgunaan ini menyebabkan ketidakpercayaan petani kakao

terhadap keberadaan koperasi saat ini, karena ditakutkan akan terjadi lagi penyalahgunaan keuangan seperti sebelumnya.

Dengan posisi kelembagaan yang masih lemah dalam rantai nilai produksi kakao, maka akibatnya adalah petani tidak dapat memiliki kekuatan dari segi kuota produksi. Hal ini berdampak pada lemahnya posisi tawar petani di dalam rantai perdagangan kakao di Majene. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemda Kabupaten Majene mendirikan Unit Pengolahan Hasil (UPH) sebagai inisiasi penguatan kelembagaan petani dan wadah bagi para petani untuk melakukan pemasaran bersama. Dengan adanya pemasaran bersama, petani diharapkan dapat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibanding dengan pemasaran secara individu. UPH ini berbentuk bangunan dan juga alat-alat pemrosesan yang dapat digunakan oleh para petani maupun kelompok tani untuk membantu proses pengolahan lanjutan dan juga menerima penjualan biji kakao para petani dengan harga yang layak. Dalam pembentukannya, UPH ini menggunakan dana program GERNAS dan juga mengikutsertakan peran dari kelompok tani andalan dalam penyediaan lahan dan juga dalam hal pengelolaannya. Alasan pemilihan kelompok tani yang mengelola UPH berdasarkan kapasitas poktan, yang telah dimiliki oleh poktan andalan dan lokasi poktan yang dapat dijangkau oleh para petani.

Selain bangunan, modal dan alat-alat produksi bagi UPH adalah salah satu paket kegiatan di dalam program Gernas Kakao. Dalam paket tersebut, kabupaten yang menjadi pelaksana program Gernas mendapat bantuan UPH sebesar satu unit setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2010-2012, telah dibangun tiga unit UPH di Kabupaten Majene. Ketiganya terletak di Kecamatan Sendana (tahun 2010), Kecamatan Tammerodo (tahun 2011) dan Kecamatan Malunda (tahun 2012). Penentuan lokasi UPH didasarkan ketiga kecamatan terpilih merupakan sentra kakao di Majene.

Seperti yang telah disebutkan diatas, tujuan pendirian UPH ini adalah inisiasi awal dari penguatan kelompok tani. Pada tingkatan ideal, sebuah inisiasi penguatan kelembagaan seharusnya di damping sampai lembaga tersebut menjadi mandiri. Saat ini pendampingan terhadap UPH belum optimal. Pemda sebagai pihak yang berkepentingan terhadap penguatan kelembagaan ini hanya berperan pada saat pendirian UPH, dan belum ada program pendampingan yang berkelanjutan terhadap UPH.

Meskipun sudah terdapat UPH di beberapa kecamatan, para petani di kecamatan yang terdapat UPH tersebut masih menjual biji kakaonya secara individu, tidak melalui UPH. Ada beberapa alasan petani tidak menjual biji kakaonya ke UPH, diantaranya sistem ijon yang dilakukan petani dengan

pedagang sarana produksi sekaligus pengepul mengharuskan petani menjual hasil panennya kepada pedagang tersebut. Cakupan wilayah UPH yang belum mencakup keseluruhan wilayah di kecamatan terkait juga membuat petani lebih memilih menjual kepada pengepul yang datang ke rumah-rumah.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendorong petani menjual biji kakaonya ke UPH. Upaya tersebut diantaranya adalah penyediaan bantuan modal usaha (kredit modal) kepada para petani, penyediaan sarana produksi (pupuk, pestisida dan alat tani) maupun sembako secara kredit kepada petani, pelatihan kepada petani dari pemda Majene maupun dari pengelola UPH serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas penjemuran (pengeringan) biji kakao dan penitipan biji kakao jika harga kakao di pasaran rendah. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar UPH dapat memberikan keuntungan bagi petani sehingga petani mau bekerja sama dengan UPH.

Salah satu upaya yang baik untuk diaplikasikan di UPH lain adalah praktek pemberian merk "UPH Malunda" terhadap biji kakao yang di jual melalui UPH. Keuntungan yang diperoleh para petani anggota UPH Malunda adalah dengan adanya penggunaan merk bersama, petani kakao anggota UPH Malunda, dapat menjual biji kakaonya langsung kepada pedagang besar tanpa adanya potongan-potongan, karena merk UPH sudah menjadi jaminan bagi pedagang besar.

C. SUMBERDAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam produksi. Dalam hal ini, SDM berperan penting dalam melakukan kegiatan *on farm* maupun *off farm* perkebunan kakao. Untuk meningkatkan kualitas SDM di rantai budidaya terdapat beberapa stakeholder, yaitu Pemda, penyuluh, NGO, maupun petani kakao sendiri. Pemda dapat berperan melalui pelaksanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan penyuluh berperan sebagai penyambung program-program Pemda agar sampai kepada petani. NGO juga dapat berperan untuk mendampingi petani dalam proses peningkatan kualitas petani.

Tingkat pengetahuan dan keterampilan petani kakao di Majene masih beragam. Beberapa petani yang menjadi 'petani andalan' merupakan petani yang telah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik dalam merawat kebun kakao. Para petani andalan tersebut juga sering mengadakan pelatihan kepada petani lain mengenai cara berkebun yang baik. Secara umum, permasalahan utama dalam SDM kakao adalah kurangnya motivasi memelihara kebun, kurangnya motivasi dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan, serta pengetahuan standar kualitas dan harga yang masih rendah. Dengan tingkat pengetahuan yang rendah terhadap standar kualitas

dan harga pada akhirnya membuat petani menjual biji kakao melalui pengeringan saja, dan terkadang pengeringan asalan (hanya mengeringkan biji kakao seadanya, biasanya dilakukan 1 hari saja).

Upaya Pemda untuk untuk meningkatkan kapasitas petani masih belum optimal. Program-program memang sudah dilakukan oleh Pemda melalui penyuluh. Namun program ini baru sebatas merawat kebun saja. Belum menyentuh kepada penguatan kapasitas petani dalam berorganisasi misalnya. Sehingga seharusnya dilakukan juga penyuluhan atau pelatihan keorganisasian kepada petani agar dapat membentuk kelembagaan yang kuat. Peran penyuluh juga belum optimal mengingat jumlah penyuluh yang masih kurang, sehingga belum mencakup keseluruhan petani di Majene.

Dampaknya adalah, hingga kini masih terdapat petani yang malas untuk merawat kebun kakao mereka. Padahal, perawatan kebun merupakan syarat utama keberhasilan berkebun kakao. Petani menjadi malas merawat kebun karena ketiadaan modal untuk membeli saprodi yang dibutuhkan. Ketiadaan modal ini karena sedikitnya margin keuntungan yang diterima oleh para petani karena margin dari harga kakao yang tipis. Dampak selanjutnya adalah petani menjadi malas mengikuti penyuluhan atau pelatihan tentang perawatan kebun, baik yang diselenggarakan oleh Pemkab Majene maupun diselenggarakan oleh poktan mereka sendiri, karena merasa tidak mendapatkan keuntungan langsung dari merawat kebun tersebut.

4.2.3. PEMANENAN DAN PENGOLAHAN/PASCA PANEN

Proses pengolahan atau pasca panen yang dilakukan setelah pemanenan adalah petik dilanjutkan dengan sortasi buah, pecah buah, dan kemudian Fermentasi atau pengeringan langsung. Setelah proses tersebut dilakukan, maka biji kakao sudah siap dikemas atau langsung dijual kepada pedagang.

I. Petik Buah/Pemanenan

Tahapan pertama pemanenan adalah pemetikan buah. Pemetikan buah ini dilakukan kepada buah yang siap dipanen. Buah yang siap di panen memiliki ciri-ciri seperti:

- Perubahan warna alur dari hijau menjadi kuning orange \pm 50 %
- Buah masak porosnya agak kering, biji-biji didalam agak renggang dari kulit buah terbentuk rongga antara biji dan kulit buah.
- Buah apabila dikocok/diguncang berbunyi

Untuk proses pemetikan sendiri terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh petani.

- Petik buah yang betul-betul masak menggunakan pisau atau sabit bergalah yang tajam

- Rotasi pemetikan setiap 7 atau 14 hari
- Rendam buah yang busuk atau terserang hama/penyakit kedalam tanah sedalam 50 cm di pinggir kebun
- Selama memanem buah diusahakan tidak merusak atau melukai batang tanaman/bantalan buah

II. Pasca Panen

Setelah pemetikan buah, terdapat beberapa tahapan penanganan pasca panen kakao yang meliputi:

1. Sortasi buah

Buah yang sudah masak dipanen, kemudian dimasukkan kedalam keranjang, dan diangkut ketempat pengumpulan buah yang letaknya masih dalam kebun. Setelah itu di lakukan sortasi dalam dua tahap yaitu :

a. Sortasi I

Sortasi pertama yang dilakukan terhadap buah adalah melakukan pemisahan antara buah kakao yang sehat dan masaknya sempurna dengan buah yang tidak sempurna. Setelah dilakukan sortasi pada tahap pertama ini, proses selanjutnya adalah sortasi ke dua terhadap

b. Sortasi II

Setelah itu dilakukan sortasi kembali untuk memilah secara cermat buah yang akan dipecahkan atau diambil biji kakaonya. Terdapat beberapa acuan dalam memilih buah kakao yang akan diambil bijinya yaitu:

- Buah yang kurang baik/terserang ulat buah
- Buah belum masak/keliru pungut
- Biji dari sortasi I yang tercampur tanah
- Biji yang tercecer ditanah, bekas buah yang dimakan tikus/bajing

2. Pemecahan Buah

Setelah buah di sortir menjadi dua golongan antara kualitas baik dan buruk, maka buah dengan kualitas baik di pecahkan ditempat terpisah dengan beralaskan karung goni. Proses pemecahan buah adalah dipukul dengan kayu dan diupayakan jangan sampai biji menjadi rusak/pecah. Setelah itu biji dikeluarkan dan dimasukkan kedalam wadah.

3. Pengeringan Langsung dan Fermentasi

Terdapat dua proses pengolahan biji kakao sebelum masuk ke pabrik, yaitu fermentasi dan pengeringan. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan alat berbentuk kotak (box), dimana biji kakao dimasukkan ke kotak tersebut selama 4-6 hari. Selanjutnya, biji kakao hasil fermentasi tersebut dikeringkan selama \pm 5 hari hingga biji kakao berkadar air 7-8. Proses fermentasi dapat menghasilkan aroma yang harum dan kualitas biji kakao yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Proses pengolahan lainnya adalah pengeringan. Proses ini hanya memerlukan penjemuran di atas

satu media atau alas setelah biji kakao di panen. Proses pengeringan ini memakan waktu kurang lebih 2-3 hari, lebih cepat dari proses fermentasi. Namun proses pengeringan dengan metode penjemuran ini akan memiliki kendala pada saat terjadi musim hujan dimana sinar matahari tidak seterang musim kemarau.

Sebagian besar petani kakao di Majene tidak melakukan proses fermentasi terhadap biji kakaonya, melainkan langsung dikeringkan. Selain membutuhkan waktu yang lama untuk proses fermentasi (sekitar 4-6 hari), alasan utama petani enggan melakukan fermentasi adalah perbedaan harga yang kecil antara biji kakao yang sudah di fermentasi maupun yang melalui proses pengeringan biasa, yaitu kurang lebih Rp. 1000,-/kg. Petani menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan fermentasi lebih besar daripada proses pengeringan biasa. Selain itu, faktor lainnya adalah petani membutuhkan *cash flow* yang cepat, sehingga petani lebih memilih melakukan pengeringan biji kakao, karena dengan proses pengeringan yang cepat, petani juga dapat menjual biji kakao lebih cepat daripada produk fermentasi.

4. Kelembagaan

Untuk memfasilitasi petani melakukan proses fermentasi, Pemda melalui program GERNAS saat ini telah mendirikan Unit Pengolahan Hasil (UPH) di beberapa tempat. Di UPH ini tersedia alat-alat untuk melakukan proses fermentasi maupun pengeringan biasa. Alat-alat ini didapatkan melalui pelaksanaan program GERNAS. Untuk lahan yang digunakan sebagai bangunan UPH disediakan oleh kelompok tani yang dipercayakan untuk mengelola UPH. Dengan keberadaan UPH ini setidaknya petani dapat terbantu dan tidak lagi menjual kakao yang dikeringkan secara asal-an saja. Selain itu, pada saat musim hujan, peran UPH juga dapat dioptimalkan karena di UPH tersedia mesin pengeringan. Meskipun mesin pengeringan ini juga dapat mengurangi cita rasa dan aroma biji kakao dan membutuhkan kayu dalam jumlah besar sebagai bahan bakar. Oleh karena itu, mesin ini hanya digunakan dalam keadaan sangat mendesak, dalam artian masih banyak biji kakao yang belum terproses.

Saat ini, keberadaan UPH sebagai fasilitas pengolahan biji kakao masih belum optimal karena belum banyak petani yang mengolah biji kakao di UPH. Hal ini dikarenakan petani masih lebih suka menjual biji kakao, meski dengan kualitas asal-an, kepada pengepul, karena pengepul mendatangi petani dari rumah kerumah. Disatu sisi, tindakan yang dilakukan oleh pedagang pengepul tersebut memudahkan petani dan petani tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mengantar biji kakao ke UPH, Dalam mata rantai pengolahan, peran Pemda baru sebatas memfasilitasi pengadaan UPH melalui dana GERNAS. Belum terlihat adanya

upaya lain dalam mencoba mendorong produk olahan berupa fermentasi. Salah satu usulan yang disampaikan oleh Pemda adalah melakukan penerapan Peraturan Daerah tentang fermentasi. Melalui perda tersebut Pemda dapat mendorong petani untuk melakukan proses fermentasi terhadap sebagian atau bahkan keseluruhan hasil panennya. Keberadaan regulasi tersebut juga dapat mengatur sistem penjualan biji kakao yang di fermentasi dengan non fermentasi, terutama mengatur penjualan kakao kepada pengepul. Selain itu, peran pemda juga dapat dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas UPH dalam melakukan fermentasi dan proses pengeringan biji kakao agar dapat menerima pasokan biji kakao yang lebih besar lagi dari petani.

Di sisi lain, para petani masih belum memahami pentingnya proses pengolahan biji kakao. Padahal, proses pengolahan yang tepat mampu mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini mengingat kebutuhan industri atau pabrik pemrosesan coklat yang lebih membutuhkan biji kakao yang telah di fermentasi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi penyuluhan petani agar petani termotivasi dan mengetahui kebutuhan industri coklat yang sebenarnya. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan regulasi mengenai fermentasi, Pemda juga seharusnya menyediakan akses langsung kepada pabrikan atau industri bagi petani kakao, sehingga petani kakao dapat menjual langsung biji kakao yang telah di fermentasi dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada akhirnya petani pun akan tertarik melakukan fermentasi biji kakao.

4.2.4. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Pemasaran yang efektif sangat dibutuhkan dalam memasarkan biji kakao. Salah satu faktor yang menentukan pemasaran yang efektif dan efisien sedikitnya rantai nilai pemasaran. Dengan sedikitnya rantai nilai pemasaran, maka dampaknya adalah tingkat harga yang baik bagi petani. Semakin tinggi harga jual biji kakao, yang berarti juga meningkatnya selisih harga yang diterima petani, akan membuat petani termotivasi untuk meningkatkan produksinya. Hal ini berarti bahwa peningkatan produktivitas saja belum cukup, namun harus diikuti penyempurnaan/perbaikan dalam saluran-saluran pemasaran. Salah satu perbaikan dalam rantai pemasaran adalah mengefisiensikan rantai distribusi atau perdagangan kakao dari petani sampai ke pabrikan pengolahan coklat. Berikut ini adalah tiga saluran utama pemasaran kakao di kabupaten Majene:

- 1) Petani »» Pedagang pengumpul desa »» pedagang pengumpul kecamatan »» pedagang besar »» pabrik
- 2) Petani »» pedagang pengumpul kecamatan »» pedagang pengumpul besar »» pabrik
- 3) Petani »» UPH »» pedagang pengumpul kecamatan »» pabrik

Para petani biasanya menjual biji kakaonya ke para pengepul yang datang ke rumah-rumah. Para pengepul yang datang ke rumah-rumah petani tersebut merupakan anggota dari pengepul kecamatan sehingga mereka setelah mengambil biji kakao dari petani, mereka menjualnya ke pedagang kecamatan. Di samping itu, petani juga bisa menjual kakaonya ke pedagang kecamatan, tanpa harus melalui pedagang pengumpul desa. Dari ketiga jalur tersebut, petani tidak bisa langsung menjual biji kakao ke pedagang pengumpul besar atau ke pabrik. Disini terlihat bahwa akses petani kepada pabrikan atau industri belum ada. Padahal, jika petani menjual langsung ke pabrik, beda harga yang didapatkan bisa mencapai Rp 4.000/kg. Hal ini jelas akan menguntungkan bagi petani.

Pedagang besar biji kakao tidak berasal dari Majene, melainkan dari Polewali Mandar. Salah satu pengumpul besar yang masuk ke Majene adalah CV. Bumi Surya. Meskipun terletak di Polewali Mandar, area pembelian kakao mencakup hampir semua kabupaten di Sulawesi Barat, seperti Majene, Mamasa, Mamuju serta Polewali Mandar. Harga yang ditetapkan Bumi Surya untuk pembelian biji kakao kepada pedagang pengumpul mengacu pada bursa komoditas kakao internasional di New York sehingga harga beli kakao sangat berfluktuasi. Untuk menyalahi fluktuasi harga tersebut, beberapa pedagang pengumpul kecamatan melakukan kontrak tidak tertulis dengan CV. Bumi Surya.

Kontrak tidak tertulis ini merupakan kesepakatan harga beli kakao dengan volume tertentu dalam jangka waktu maksimal 5 hari. Dengan kesepakatan ini, harga beli biji kakao selama 5 hari akan ditentukan di awal sehingga dalam kurun waktu tersebut harga biji kakao tetap (tidak berubah). Biji kakao tersebut dijual dari pedagang pengumpul besar (CV. Bumi Surya) ke pabrik-pabrik nasional, seperti PT. Bumi Tangerang, PT. Petra Food dan PT. General Food. Sistem jual beli yang digunakan adalah sistem kontrak berbasis volume. Kontrak tersebut merupakan perjanjian volume biji kakao yang dikirimkan selama satu periode tertentu. Sementara harga biji kakao tidak dimasukkan kedalam kontrak melainkan mengikuti harga yang terdapat pada bursa komoditas kakao internasional di New York.

Kebijakan pengenaan bea keluar atas export kakao berdampak positif terhadap penghasilan petani. Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.67/PMK.011/2010) tentang kebijakan pengenaan bea keluar terhadap ekspor biji kakao sebesar kurang lebih 5%, mendorong para pedagang besar menjual biji kakao ke pabrik dalam negeri karena dinilai lebih menguntungkan daripada mengeksport biji kakao ke luar negeri. Dampak positif dari penerapan Bea keluar adalah mulai tersedianya pasokan untuk industri dalam negeri. Sementara bagi petani dapat menikmati keuntungan dengan kenaikan harga

beli kakao mereka. Hal ini dikarenakan industri pengolahan kakao membuat Buyer Station di sentra produksi, sehingga menguntungkan petani. Sebelum penerapan BK, petani hanya menerima 80% dari harga terminal, dan setelah BK lebih dari 90% harga terminal. Namun sayangnya peningkatan harga yang diterima oleh petani tersebut tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas.

Hingga saat ini belum ada pabrikan yang langsung membeli dari petani Majene. Beberapa pabrik besar seperti PT. Bumi Tangerang dan PT. Petra Food` pernah berniat untuk bekerja sama langsung dengan para petani. Namun, kerjasama tersebut belum dilaksanakan karena para petani masih belum siap untuk memenuhi volume dan kualitas biji kakao sesuai yang diminta oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut dikarenakan kapasitas produksi petani yang masih kecil. Salah satu jalan agar petani dapat memenuhi kuota tersebut adalah dengan membentuk gapoktan atau memanfaatkan gapoktan jika sudah ada. Dengan memanfaatkan gapoktan akan tercapai kuota yang diinginkan oleh pabrikan. Selain itu, kualitas biji kakao akan tetap terjaga karena gapoktan hanya akan menjual biji kakao yang memenuhi standar kualitas. Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, perusahaan besar bersedia bekerja sama dengan petani.

Peran Pemda dalam rantai pemasaran juga belum terlihat. Belum terlihat adanya upaya Pemda untuk ikut serta memasarkan biji kakao dari Majene, atau membuka akses langsung kepada perusahaan. Selain itu, belum ada regulasi yang mengatur tata niaga kakao di Majene. Regulasi yang mengatur tata niaga kakao ini bisa digunakan untuk menciptakan atau membuka akses pasar ataupun memperpendek rantai pemasaran. Regulasi juga bisa digunakan untuk menjaga kualitas produk kakao majene sesuai dengan kebutuhan industri.

Salah satu jalan lain agar biji kakao dapat diterima oleh pabrikan adalah melalui sertifikasi bagi biji kakao Majene. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menandakan produk kakao yang akan diperjualbelikan telah memiliki standar dan kualifikasi sesuai aturan yang berlaku di dunia internasional. Dengan adanya sertifikasi ini bisa diperoleh margin yang cukup menguntungkan bagi petani kakao. Biasanya margin ini sebesar Rp. 2000,-/kg. Namun biaya sertifikasi ini cukup tinggi, karena proses untuk mendapatkannya melalui beberapa tahapan. Karena biayanya yang cukup tinggi, petani belum banyak yang melakukan sertifikasi ini.

Stakeholders yang terlihat perannya pada rantai pemasaran ini adalah pedagang pengepul di tingkat desa dan kecamatan. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa sistem jual beli yang digunakan adalah sistem ijon, dimana petani dapat berhutang dan pembayarannya nanti adalah jumlah produksi biji

kakao. Hal ini mengakibatkan petani tidak memiliki kekuatan dan hanya sebagai penerima harga (*price taker*).

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah belum tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses distribusi dan pemasaran seperti jalan. Topografi Majene yang berbukit juga menjadi kendala tersendiri bagi petani untuk memasarkan produksinya. Saat ini tidak semua sentra kakao memiliki infrastruktur jalan yang baik, terutama sentra kakao yang berada di perbukitan. Hal ini mengakibatkan biaya tinggi untuk mendistribusikan biji kakao dari sentra produksi ke tempat pemasaran. Infrastruktur jalan yang buruk ini tidak hanya mengakibatkan biaya tinggi pada distribusi produk, namun juga pada distribusi saprodi bagi daerah-daerah sentra kakao yang infrastruktur jalannya buruk.

A. Kelembagaan

Belum terdapat satu kelembagaan pada mata rantai pemasaran kakao di Majene yang mewadahi atau melingkupi proses transaksi antara penjual dan pembeli. Pemasaran yang dilakukan sebagian besar dilakukan oleh para petani langsung kepada pengepul tingkat desa atau kecamatan. Tidak ada pasar yang dibuka sebagai tempat terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengepul.

Selain itu, belum terbentuk forum atau kemitraan antara petani kakao dengan para stakeholder lainnya seperti perbankan, pedagang pengepul dan perusahaan. Dengan adanya forum ini, dapat tercapai kesepakatan-kesepakatan antara pelaku usaha kakao dengan para pelakunya. Dengan terbentuknya forum ataupun kemitraan, dapat terjalin komunikasi yang erat, tidak hanya Pemda kepada petani, tapi juga Pemda kepada pabrikan atau perusahaan pengolah biji kakao.

4.3. RENCANA KE DEPAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

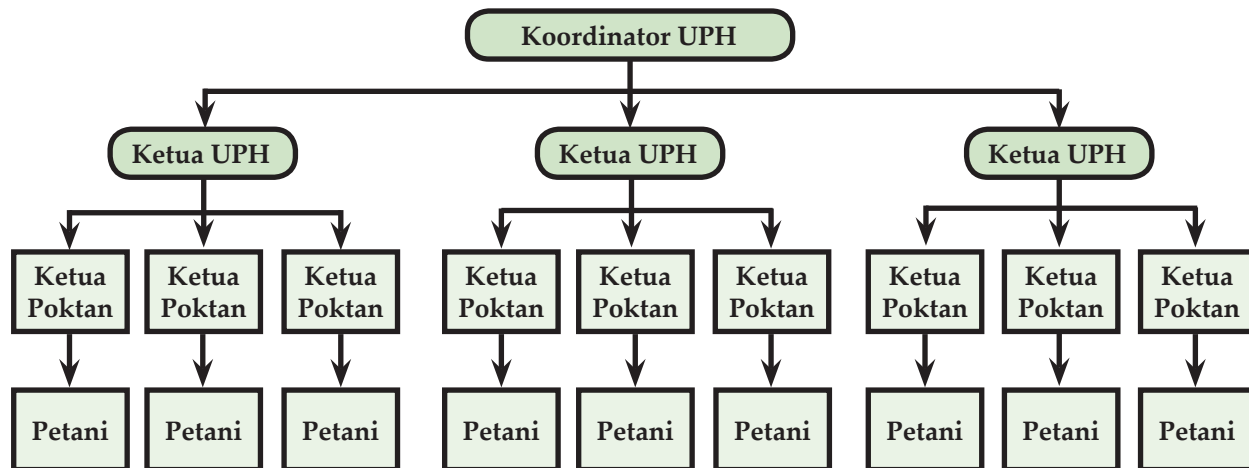
Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku rantai nilai usaha kakao khususnya petani di Kabupaten Majene seyogyanya merupakan masalah yang harus dipecahkan bersama. Tidak hanya Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dinhutbun) Majene, pelaku lain seperti petani, UPH serta pengusaha harus mendukung solusi atas berbagai permasalahan tersebut.

Pemda Majene melalui Dishutbun telah memiliki rencana ke depan untuk memperbaiki rantai nilai kakao, yaitu:

- Peningkatan mutu biji kakao melalui pelatihan dan penyuluhan kepada para petani mengenai pentingnya mutu dan kualitas biji kakao. Dengan kualitas produk yang meningkat, harga pun akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani.
- Peningkatan volume produksi biji kakao agar dapat memenuhi permintaan pengusaha. Promosi yang dilakukan Pemda dapat menarik minat pengusaha untuk membeli biji kakao langsung dari petani Majene. Namun, para petani belum mampu memenuhi standar mutu dan volume biji kakao yang diinginkan pengusaha. Oleh karena itu, Dinhutbun sedang menyiapkan pemasaran bersama melalui ketiga UPH yang ada di Kabupaten Majene yang nantinya ketiga UPH tersebut akan dikoordinir oleh satu orang. Dalam rangka ke arah sana juga dilakukan dengan peningkatan peran dan kekuatan poktan-poktan yang ada. Penyatuan UPH-UPH tersebut bertujuan untuk mengumpulkan semua hasil produksi biji kakao dari para petani agar dapat memenuhi standar mutu dan volume biji kakao yang diinginkan pengusaha.

Secara ringkas, susunan organisasi petani kakao yang diharapkan Dinhutbun adalah sebagai berikut: Pemkab Majene juga akan melakukan penguatan poktan melalui UPH, meskipun bukan hal yang mudah. Jumlah UPH yang masih terbatas (3 unit) dinilai belum cukup untuk menampung

Gambar 2. Rencana Susunan Organisasi Petani Kabupaten Majene



jumlah seluruh produksi petani yang ada di tiga kecamatan tersebut. Tersedianya satu unit UPH di tiap kecamatan sentra produksi kakao masih belum menjadi solusi agar petani mau menjual biji kakaonya ke UPH mengingat jarak yang jauh antara kebun kakao dengan UPH tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari pengelola UPH untuk turun langsung membeli biji kakao dari rumah-rumah petani. Selain peran aktif tersebut, para petani perlu diberi beberapa keuntungan atau insentif agar petani bersedia menjual biji kakaonya di UPH. Beberapa diantaranya adalah penyediaan sarana produksi (pupuk, fungisida dan pestisida) serta kebutuhan sembako bagi para petani secara kredit, pelatihan dan penyuluhan yang intensif, pemberian fasilitas pengeringan biji kakao serta penginformasian harga pasar biji kakao setiap hari.

Solusi atas pengefisienan rantai nilai melalui penguatan UPH membutuhkan peran aktif tidak hanya dari Pemda, melainkan dari pengelola UPH maupun para petani sendiri. Para petani perlu diberikan motivasi agar mereka bersedia melakukan pemasaran bersama seperti yang direncanakan oleh Pemda. Dengan pemasaran bersama, petani akan mendapatkan keuntungan (margin) lebih daripada mereka menjualnya secara individu.

V. PENUTUP

Dari paparan di atas, dapat dapat diambil beberapa kesimpulan berikut sebagai masalah rantai nilai kakao di Majene:

1. Dari sisi petani, masih kurang kesadaran agar menjual biji kakao yang sudah memiliki standar kekeringan tertentu. Masih banyak petani yang menjual biji kakao dengan pengeringan asalan. Sementara di satu sisi, kebutuhan pabrikan adalah biji kakao dengan kualitas fermentasi.
2. Sistem jual beli yang diterapkan antara penyedia saprodi dan petani masih bersifat kredit. Hal ini akan memberatkan petani karena ketika panen, harga biji kakao bisa ditekan oleh penyedia saprodi yang juga berprofesi sebagai pengepul. Bahkan masih ada sistem jual beli berupa ijon. Sistem ijon ini biasanya dilakukan oleh pedagang pengepul di tingkat desa, dimana petani tingkat desa memiliki utang kepada mereka karena kurangnya modal ataupun arus kas keuangan yang baik untuk menutupi kebutuhan atau merawat kebun.
3. Kelembagaan yang ada seperti poktan/Gapoktan masih belum dapat menguatkan posisi tawar petani di dalam pasar karena kelembagaan ini baru pada tingkatan inisiasi saja. Gapoktan pun tidak berfungsi, meskipun ada, yang lebih sering bergerak adalah petani maupun poktan.
4. Masih belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang produksi kakao atau standar biji kakao yang diterapkan oleh pemda Majene. Dengan

pengaturan khusus ini, kualitas biji kakao yang diinginkan oleh pengusaha atau pabrikan seperti biji kakao yang di fermentasi terjaga.

5. Belum ada akses pasar langsung bagi petani kakao di Majene. Pemasaran masih bergantung pada pengepul. Belum ada pabrikan yang langsung membuka akses atau langsung ke petani.
6. Koordinasi dan sinkronisasi antara Pemprop dengan Pemkab untuk pelaksanaan GERNAS masih belum kuat. Hal ini terlihat dari perbedaan jadwal pengadaan dengan pelaksanaan.

Usulan Tindak Lanjut

1. Perlu dilakukan penguatan kapasitas petani termasuk pengetahuan dalam pengolahan hasil biji kakao dan pemasaran. Hal ini sangat penting agar petani menjadi mandiri dalam kegiatan *off-farm*.
2. Perlu dibentuk regulasi khusus untuk mengatur standar mutu biji kakao, sehingga bisa terjadi *matching in* antara kebutuhan pabrik dengan kualitas kakao yang dihasilkan.
3. Perlu didorong pembentukan dan penguatan kelembagaan untuk petani kakao. Kelembagaan ini dapat berbentuk asosiasi atau koperasi. Dengan keberadaan asosiasi ini, diharapkan petani kakao di Majene memiliki kekuatan di pasar.
4. Perluasan akses pasar untuk petani yang di fasilitasi oleh Pemda. Perluasan ini dimaksudkan adanya pemberian kesempatan bagi petani untuk melakukan kontrak dengan pabrikan. Dengan kesempatan untuk melakukan kontrak dengan pabrikan, petani akan mendapatkan harga yang layak untuk produk biji kakao.
5. Perlu pendampingan teknis bagi petani agar memiliki pemahaman terhadap pentingnya kualitas biji kakao yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pabrikan. Dengan menjaga kualitas biji kakao yang baik, tentunya akan mendapatkan kepercayaan dari perusahaan dan bisa melakukan kontrak.
6. Perlu dibentuk satu forum dan kemitraan bagi seluruh stakeholder kakao di Majene. Kegunaan forum ini adalah sebagai wahana untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di kakao Majene. Selain itu, dari forum tersebut, dapat dirumuskan bentuk kemitraan yang menguntungkan bagi para *stakeholder*.
7. Selain penguatan kelembagaan, aspek infrastruktur juga perlu diperhatikan dalam menganalisis rantai nilai kakao. Infrastruktur yang buruk menyebabkan semakin mahal biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut biji kakao dari kebun ke pasar. Karena itu, pembangunan infrastruktur di sentra produksi kakao (jalan produksi) diperlukan untuk mempermudah akses pasar bagi komoditas kakao.
8. Koordinasi antara Pemda juga perlu ditingkatkan. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik ini, dapat terbentuk keselarasan program antara program Propinsi dan Program Kab./Kota. ■

Lampiran 1. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Majene

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
SARANA PRODUKSI:				
<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Pupuk, pestisida, dan alat-alat bertani yang dimiliki oleh petani Ketiadaan pasokan atau terputusnya pasokan pupuk yang dipakai dalam GERNAS Luas dan sebaran wilayah perkebunan yang menjadi sentra produksi kakao yang memiliki tipologi dan kontur wilayah beragam Sudah terdapat beberapa took saprodi ditingkat kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya kemampuan permodalan yang dimiliki oleh petani Pupuk yang dipakai dalam GERNAS tidak di jual bebas di pasaran Infrastruktur yang buruk di daerah sentra-sentra produksi kakao 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya kemampuan petani dalam menyediakan saprodi Masih kurangnya infrastruktur pendukung untuk distribusi saprodi Belum tersedianya dana atau prioritas pembangunan infrastruktur ke daerah sentra produksi kakao 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kemampuan permodalan petani melalui peningkatan peran perbankan Meningkatkan peran UPH sebagai salah satu sarana distribusi saprodi Membangun infrastruktur, khususnya jalan yang menuju daerah sentra produksi kakao 	<ul style="list-style-type: none"> Dishutbun Bappeda Diskoperindag Dinas PU Lembaga Perbankan UPH Distributor Saprodi
BUDIDAYA / USAHA PERKEBUNAN:				
<p>Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan lahan 1-2 hektar per petani dengan tingkat produktivitas sebesar 0,95 ton Masih terdapat kebun yang belum dirawat dengan baik Masih terjadi serangan hama dan penyakit tanaman kakao Umumnya pertanian kakao dilakukan turun temurun 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat produktivitas masih rendah dibandingkan tingkat optimal yang mencapai 3 ton/ha Petani enggan merawat kebun Tingkat kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki petani masih kurang Tidak adanya regenerasi petani dalam hal budidaya kakao 	<ul style="list-style-type: none"> Petani tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai Pertanian kakao dipandang tidak menarik bagi generasi muda 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan secara intensif kepada petani untuk dapat melakukan perawatan kebun Perlunya peningkatan pengetahuan petani untuk menggunakan pupuk. Penguatan kelembagaan & kapabilitas penyuluh bidang kakao secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kapasitas petani. 	<ul style="list-style-type: none"> Dishutbun Bappeda Diskoperindag Badan Penyuluh Lembaga Perbankan UPH Distributor Saprodi Staff Ahli Bidang Pertanian

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
BUDIDAYA / USAHA PERKEBUNAN:				
Kelembagaan: <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kurang lebih 1000 kelompok tani, hanya 10% yang masih berfungsi • Terdapat Unit Pengolahan Hasil yang dibangun melalui dana GERNAS dan dikelola oleh poktan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani hanya mengejar motif rente dari bantuan pemda • Kurang kuatnya organisasi petani kakao • Pembinaan Poktan masih belum terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada penataan dan pembinaan kelompok tani yang lebih terarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kebijakan untuk mengatur dan membina keberadaan kelompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> • DPR • Dishutbun • Bappeda • Diskoperindag • Badan Penyuluh • Lembaga Perbankan
SDM (Sumber Daya Manusia): <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyuluh sekitar sekitar 42 orang (penyuluh tetap, tenaga harian lepas dan penyuluh swadaya) • Kapasitas petani dalam pengelolaan kebun masih kurang • Umumnya yang melakukan budidaya kakao adalah petani dengan usia diatas 40 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyuluh yang masih kurang • Kapasitas petani yang masih kurang dalam melakukan pengelolaan kebun • Mulai menu-runnya proses regenerasi petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kualitas dan kuantitas penyuluh • Kurangnya kapasitas petani dalam hal pengetahuan, ketrampilan dan sikap 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh • Meningkatkan kapasitas petani terutama dalam hal kapasitas <i>Off Farm</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan penyuluh • Dinas Kehutanan dan Perkebunan • Bappeda • Diskoperindag
PENGELOLAAN PASCA PANEN:				
<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas biji kakao masih kurang dan belum memenuhi standar yang diinginkan oleh pabrikan • Pengolahan pasca panen, seperti pengeringan dilakukan secara asalan • Kebanyakan petani hanya mengeringkan 1 hari kemudian langsung jual ke pedagang desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan arus keuangan petani yang cepat sehingga petani membutuhkan pemasukan perharinya • Infrastruktur pendukung yang dimiliki petani untuk melakukan pengolahan lanjutan tidak memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya peralatan untuk melakukan pengolahan yang baik • Pengetahuan petani dalam melakukan pengolahan hasil panen masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas petani melalui program-program penyuluhan terkait pengelolaan pasca panen • Memperkuat kapasitas UPH dalam khususnya dalam hal peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda • LSM • Lembaga keuangan • Buyer

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN PASCA PANEN:				
<ul style="list-style-type: none"> Sarana untuk melakukan pengeringan yang belum memadai, petani masih melakukan pengeringan di pinggir jalan atau tempat yang kebersihannya kurang terjamin 	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan yang ada di UPH belum memadai untuk menampung hasil panen biji kakao masyarakat 			
PEMASARAN DAN HARGA JUAL:				
<ul style="list-style-type: none"> Harga kakao fluktuatif mengikuti harga bursa komoditi New York: Kisaran harga antara 17 ribu sampai dengan 25 ribu rupiah (kualitas kadar air 7). Sedangkan harga di tingkat petani, harga biji kakao berkisar antara Rp. 6000,-/kilogram s.d. Rp 7.000,-/kilogram Petani lebih suka menjual langsung kepada pedagang desa, meskipun harga rendah karena dorongan kebutuhan. Tingkat pengetahuan petani akan kualitas biji kakao yang sesuai dengan standar / kebutuhan pasar masih rendah. Masih ada sistem ijon dari pedagang pengepul. Infrastruktur yang masih kurang memadai untuk sebagian wilayah sentra produksi kakao. Dan belum ada infrastruktur pasar yang mempertemukan produsen biji kakao dan pembeli di Majene. 	<ul style="list-style-type: none"> Posisi tawar petani dalam menentukan harga jual kakao sangat rendah. Kurangnya kapasitas petani dalam hal permodalan Kurangnya pengetahuan petani tentang standar biji kakao yang baik, sehingga harga yang didapat pun tidak bagus Infrastruktur yang belum tersedia untuk mendukung pemasaran biji kakao 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada mekanisme pengaman ekonomi untuk menjamin kebutuhan hidup petani. Kurangnya dukungan/ keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan. Kurangnya kapasitas petani dalam hal melakukan pemasaran dan tidak adanya akses langsung ke pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka akses pasar bagi para petani Memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemasaran Meningkatkan kapasitas petani untuk mengolah biji kakao yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan 	---

Lampiran 2. Matriks Analisis *Stakeholders* Pengembangan Kakao di Kabupaten Majene

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
Kementerian Pertanian RI		
1. Ditjen Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan Program GERNAS Menyalurkan bantuan-bantuan yang berasal dari dana APBN 	<ul style="list-style-type: none"> Tetap melanjutkan program GERNAS Kakao, mengingat manfaat dari program GERNAS yang besar bagi peningkatan produksi Kakao di Majene
2. Ditjen Sarana dan Prasarana	---	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan infrastruktur pendukung
Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar	Mendukung dan mengkoordinasikan program Gernas Pro Kakao, seperti pengadaan dan penyaluran kegiatan peremajaan (bibit SE, pupuk, insektisida, fungisida), rehabilitasi (pupuk, insektisida, fungisida) dan intensifikasi (pupuk, insektisida dan feromon)	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kakao dengan Pemda Kabupaten, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait kegiatan GERNAS.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Majene	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung program Gernas Pro Kakao, seperti pengadaan dan penyaluran kegiatan peremajaan (Tan Sela, Hand sprayer, upah kerja), rehabilitasi (hand sprayer, entress (SS), upah kerja), intensifikasi (hand sprayer, Gunting Galah, upah kerja) dan pengolahan pasca panen (UFBK) serta pemberian dana bantuan untuk pelaksana teknis lapangan. Melakukan promosi produk kakao kepada investor (belum maksimal). Belum membuka akses pasar ke petani. Atau setidaknya memfasilitasi perusahaan coklat bertemu dengan petani kakao dan mengadakan kerjasama. Melakukan pendirian UPH sebagai inisiasi kelembagaan bagi petani yang bertujuan untuk meningkatkan harga biji kakao.--> Kinerjanya saat ini belum optimal. Belum melakukan fasilitasi kepada seluruh stakeholder untuk membicarakan permasalahan kakao Belum ada kerjasama dengan pihak perbankan dalam pemberian kredit permodalan bagi petani Belum ada perda yang mengatur kakao, atau investasi di sektor kakao Belum melakukan pembinaan terhadap Gapoktan. Gapoktan saat ini ada namun peranan dan kinerjanya di dalam usaha kakao tidak terlihat, yang banyak bergerak adalah poktan-poktan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan program pembinaan kepada petani secara lebih intensif Membuat perda mengenai perkebunan khususnya kakao yang bersifat pengaturan (standar kualitas kakao). Lebih intensif mengadakan promosi atau membuka jalur pemasaran Terus memberikan penguatan kapasitas kepada UPH dan petani agar bisa memenuhi standar kualitas biji kakao yang diinginkan pabrik/perusahaan Mengadakan kerjasama dengan perbankan dalam penyediaan kredit bagi petani kakao Penyediaan infrastruktur dari pusat produksi ke jalan utama Membantu petani dalam hal sertifikasi biji kakao (min. sesuai SNI) Membentuk forum antar stakeholder kakao, tujuannya untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada usaha kakao Majene maupun matching in kebutuhan antar stakeholder.

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Majene	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pembekalan khusus kepada penyuluh (PPL), padahal PPL ini perannya sangat penting dalam pembinaan petani. Pembekalan khusus ini berupa pembekalan teknis perkebunan kakao, karena kebanyakan penyuluh hanya memiliki kemampuan pada teknis pertanian pangan. • Belum menginisiasi kemitraan antar stakeholder, misalnya petani dengan perusahaan dan perbankan. Hal ini bisa sangat berguna dalam membantu petani dari segi permodalan, dimana dengan terjalannya kemitraan antara perusahaan dengan petani, maka perusahaan menjadi bapak asuh petani yang dapat menjamin petani untuk memperoleh kredit. 	
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Majene (BKP4)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung Gernas pro kakao melalui penyediaan tenaga pelaksana penyuluh pertanian (PPL). • Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada para petani, baik dari pintu ke pintu maupun mengumpulkan para petani di suatu tempat. • Memiliki wilayah pembinaan lebih dari 1 desa perorang, karena kuantitas yang kurang. • Latar belakang pendidikan yang bermacam-macam sehingga ada penyuluh yang tidak memiliki kapasitas dalam teknis berkebun kakao. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah penyuluh agar tercapai 1 orang penyuluh 1 desa
Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan bertani kakao termasuk pemeliharaan kebun, pemanenan berkala dan pemupukan • Mengikuti kegiatan pelatihan yang diberikan penyuluh dan mempraktikkannya (belum maksimal) • Melakukan pengolahan sebagian besar biji kakao dengan pengeringan dan masih sedikit yang melakukan fermentasi. • Melakukan penjualan biji kakao kepada pengepul desa, pengepul tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. • Belum terlihat adanya inisiatif untuk membentuk kelembagaan yang kuat. • Belum memiliki pengetahuan kakao di luar budidaya, seperti pengolahan yang baik, standar biji kakao yang diinginkan oleh perusahaan, maupun proses pembentukan harga biji kakao. • Belum memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai pengajuan kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeliharaan yang intensif terhadap kebun kakao agar hasil produksi dan kualitas biji kakao semakin meningkat. • Lebih memperhatikan dan melaksanakan masukan dari penyuluh yang disampaikan pada saat penyuluhan pembinaan dan pelatihan. • Melakukan proses pasca panen yang baik seperti pengeringan »» standar 7, fermentasi, dan penyortiran biji kakao. • Aktif di dalam kelompok tani. • Sertifikasi hasil produksi kakao

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan kepada petani anggota • Memfasilitasi petani anggota dalam penyediaan saprodi • Memberikan bantuan kepada petani dalam bentuk pinjaman saprodi, dan juga tempat penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi salah satu lembaga yang dapat menguatkan peran petani di dalam pasar dengan melakukan penggabungan jumlah produksi petani sehingga dapat memenuhi kuota yang diinginkan oleh pabrikan
Pengepul Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembelian langsung ke rumah-rumah petani untuk membeli biji kakao basah atau setengah kering dari para petani. • Melakukan pengeringan biji kakao selama sekitar 3-4 hari. • Melakukan penjualan ke pengepul kecamatan. 	---
Unit Pengolahan Hasil (UPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Dana paket bantuan UPH dari program Gernas digunakan sebagai modal untuk menjual alat-alat pertanian maupun sembako secara kredit • Melakukan fermentasi maupun pengeringan biji kakao • Menjual biji kakao kering kepada pengumpul kecamatan • Best practice : Memberikan label "UPH" bagi biji kakao yang dijual melalui UPH »» UPH Malunda 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih berupaya memotivasi petani dalam kelompok taninya maupun petani dari kelompok lain untuk mengeringkan atau menjual biji kakaonya di UPH. • Semakin baik dalam mengelola UPH, misal dengan sistem pemasaran yang semakin baik maupun dengan menyediakan kebutuhan untuk para petani yang semakin banyak. • Sebagai salah satu wahana penguat posisi tawar petani dalam pasar
Pengepul Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli biji kakao dari para pengepul desa atau dari petani. • Mengeringkan biji kakao sesuai dengan permintaan pengepul kabupaten. • Mengangkut biji kakao dari kecamatan ke pedagang besar • Terkadang, menggunakan sistem kontrak dengan pedagang besar. Kontrak berupa jumlah yang dikirim dengan harga tertentu dan biasanya kontrak tidak tertulis hanya berlaku maksimal 5 hari. 	---
Pengepul Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan biji kering dari para pengepul, tidak langsung dari petani. • Membeli harga dari pengepul dengan harga sesuai dengan harga pada Market New York (pasar kakao dunia). • Jual beli kakao dengan pengepul tergantung dari pengepul itu sendiri. Ada yang menggunakan kontrak dan ada juga yang tidak. • Menjual biji kakao kering (kadar 8 atau 9) ke pabrik PT. General Food, PT Bumi Tangerang, PT. Tetrapak dengan berdasarkan kontrak jumlah volume biji kakao dalam waktu tertentu (misal 1 tahun). 	---

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
Pabrik	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrikasi belum ada yang langsung berhubungan langsung dengan petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan pemda dan perbankan untuk membeli hasil produksi kakao ke petani
Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penyedia kredit dan penyalur dana revitalisasi, namun saat ini penyalurannya sedikit, karena petani jarang yang termasuk kategori bankable atau layak untuk memperoleh kredit. • Belum berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas petani dalam hal pengajuan kredit 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan akses modal kepada petani kakao dengan kemudahan fasilitas kredit • Bekerjasama dengan pemda dan pabrikan untuk menjamin pabrikan membeli produksi dari petani kakao
Ornop (LSM)/Pegiat Kakao	<ul style="list-style-type: none"> • Peran aktif untuk pendampingan petani masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ornop diharapkan mendampingi petani, terutama dalam advokasi dan penguatan kelembagaan serta kapasitas petani.
Universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peran universitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan kakao di Majene belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan Pemda untuk melakukan penelitian terhadap karakteristik kebun kakao di Majene baik di pesisir maupun di perbukitan.



LAPORAN PENELITIAN

Evaluasi Gerakan Nasional Peningkatan dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO)

KERJASAMA ANTARA:

FORD FOUNDATION

dengan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jakarta 2013

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
I. Latar Belakang GERNAS Kakao	1
II. GERNAS Kakao Menurut Persepsi <i>Stakeholder</i> Nasional	2
III. Profil Pelaksanaan GERNAS di Majene	3
3.1. Kegiatan Intensifikasi	3
3.2. Kegiatan Rehabilitasi	4
3.3. Kegiatan Peremajaan	5
3.4. Pengembangan Kapasitas Petani	9
3.5. Pembangunan Unit Pengolahan Hasil	9
3.6. Kegiatan Lain dalam GERNAS	11
IV. Capaian Program GERNAS Kakao di Kabupaten Majene	11
V. Rekomendasi Kebijakan	12
Lampiran I Matriks Peran <i>Stakeholder</i> GERNAS Kakao Majene	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perspektif Narasumber Nasional Mengenai GERNAS Kakao	2
Tabel 2.	Luas Areal Kebun Kakao di Kabupaten Majene dalam Program GERNAS Tahun 2009-2012 (hektar)	4
Tabel 3.	Wilayah Pengembangan Kakao pada Kegiatan Intensifikasi Program GERNAS Kakao di Kabupaten Majene Tahun 2011	4
Tabel 4.	Wilayah Pengembangan Kakao pada Kegiatan Rehabilitasi Program GERNAS Kakao di Kabupaten Majene Tahun 2011	5
Tabel 5.	Wilayah Pengembangan Kakao pada Kegiatan Peremajaan Program GERNAS Kakao di Kabupaten Majene Tahun 2011	5
Tabel 6.	Mata Rantai (<i>Impact Chain</i>) dan Kendala Paket Bantuan Kegiatan Intensifikasi, Rehabilitasi dan Peremajaan GERNAS Kakao	8
Tabel 7.	Mata Rantai (<i>Impact Chain</i>) dan Kendala Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petani GERNAS Kakao	10
Tabel 8.	Mata Rantai (<i>Impact Chain</i>) dan Kendala Pembangunan Unit Pengolahan Hasil	10
Tabel 9.	Capaian Program GERNAS di Kabupaten Majene dari Tahun 2008-2011	11

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar nomor dua di dunia dengan produksi sebesar 844.626 ton pada tahun 2010 (bandingkan Pantai Gading, sebagai produsen terbesar, yang pada tahun 2010 mencatat angka produksi sebesar 1.242.290 ton (FAO,2010). Dengan luas tanaman sebesar 1.652 juta Ha pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 1.746 ha pada tahun 2011 di mana sebagian besar (94%) kepemilikan arealnya dimiliki rakyat (perkebunan rakyat) dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.64 juta orang serta nilai ekspor lebih dari US\$ 1.6 Milyar per tahun, kakao merupakan salah satu komoditi strategis bagi Indonesia.

Lokasi sentra kakao tersebar di Sulawesi (63,8%), Sumatera (16,3%), Maluku dan Papua (7,1%), Jawa (5,3%), Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali (4,0%). Berdasarkan sebagian besar sentra kakao berada di wilayah Indonesia Bagian Timur, khususnya di daratan Sulawesi, menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk berkomitmen dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi petani dan perekonomian berbasis komoditas kakao di wilayah timur Indonesia.

Namun demikian, potensi kakao di Indonesia yang sangat besar tersebut semakin terancam dengan semakin meningkatnya serangan hama dan penyakit, umur tanaman yang sudah tua dan kurangnya perawatan terhadap kebun kakao. Berdasarkan identifikasi lapangan dan data tahun 2008 dari Kementerian Pertanian, terdapat 70.000 ha kebun kakao dengan kondisi tanaman tua, rusak, tidak produktif, dan terkena serangan hama dan penyakit dengan tingkat serangan berat sehingga perlu dilakukan peremajaan, 235.000 ha kebun kakao dengan tanaman yang kurang produktif dan terkena serangan hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang sehingga perlu dilakukan rehabilitasi, dan 145.000 ha kebun kakao dengan tanaman tidak terawat serta kurang pemeliharaan sehingga perlu dilakukan intensifikasi. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas, produksi, mutu produk sehingga mengakibatkan turunnya jumlah ekspor dan kesejahteraan petani kakao. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan, produktivitas tanaman selama 2004-2008 mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu sebesar 40% dari 1.100 kg/ha/tahun menjadi 660 kg/ha/tahun. Hal ini mengakibatkan kehilangan hasil produksi kakao sebesar 184.500 ton per tahun atau setara dengan Rp 3,69 triliun per tahun. Serangan hama dan penyakit juga semakin menurunkan mutu dan kualitas kakao sehingga ekspor biji kakao ke Amerika Serikat mengalami pemotongan harga sebesar US\$ 301,5/ton.

Untuk mengatasi penurunan kinerja tersebut, maka Pemerintah pada tahun 2008 telah mencanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao). Program ini pada awalnya dicanangkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk empat provinsi di Sulawesi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan sebesar 60 % volume produksi kakao berada di empat provinsi tersebut. Gerakan ini merupakan upaya percepatan peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada. Tujuannya adalah memperbaiki tingkat pendapatan petani melalui peningkatan produksi, produktivitas serta mutu kakao.

Pelaksanaan Gernas dimulai dari tahun 2009 yang hingga 2013. Pada tahun 2009 Gernas kakao dilaksanakan di 9 Provinsi (Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat) dan 40 kabupaten. Sedangkan pada tahun 2010 menjadi 13 provinsi (Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat, Kalbar, Kaltim, Gorontalo dan Maluku Utara) dan 56 kabupaten. Ke empat provinsi baru (Kalbar, Kaltim, Gorontalo dan Maluku Utara) merupakan sentra kakao di Indonesia bagian timur yang saat ini juga mendapat serangan OPT. Pada tahun 2011 pelaksanaan Gernas berkembang menjadi 25 Provinsi dan 98 Kabupaten dan pada tahun 2012 ini dilaksanakan di 14 Provinsi dan 50 Kabupaten yang merupakan sentra kakao di Indonesia Bagian Timur.

Sebagai suatu gerakan berskala nasional, maka pemerintah menilai perlu dilakukan suatu evaluasi untuk melihat relevansi, efektivitas, efisiensi, Gernas Kakao dalam mencapai output serta dampak yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan produktivitas, mutu, serta pendapatan petani. Evaluasi juga berfungsi sebagai landasan kelayakan suatu program atau proyek untuk dapat dilanjutkan. Evaluasi tersebut mencakup sisi input, proses, output serta dampak suatu program.

GERNAS Kakao merupakan upaya percepatan peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada. Tujuan GERNAS Kakao adalah memperbaiki tingkat pendapatan petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil. Sasaran GERNAS kakao tahun 2009-2011 adalah:

1. Perbaiki pertanaman kakao rakyat seluas 450 ribu ha, peremajaan tanaman 70 ribu ha,

rehabilitasi tanaman 235 ribu ha melalui teknologi sambung samping, dan intensifikasi tanaman 145 ribu ha melalui penerapan teknik budi daya sesuai standar.

2. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan kepada 450 ribu petani.
3. Pengendalian hama dan penyakit tanaman seluas 450 ribu ha.
4. Perbaiki mutu kakao sesuai SNI.

Untuk mencapai target tersebut, pada program Gernas dilakukan beberapa kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan serta pengembangan kapasitas petani. Untuk mendukung keberhasilan kegiatan utama dalam Gernas, dilakukan beberapa kegiatan pendukung, seperti pengadaan sarana dan prasaana, koordinasi, pengawalan, evaluasi dan pembuatan laporan akhir.

Tahun 2013 adalah tahun terakhir program Gernas. Dana pendukung yang untuk GERNAS Kakao di tahun 2013 lebih kecil di tahun-tahun sebelumnya yakni hanya 28.000 ha kebun kakao yang tersebar di provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dengan anggaran hanya Rp 250 Milyar. Bantuan tersebut jauh menurun dibandingkan pada tahun 2011 maupun tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1 Triliun. Akibatnya, masih cukup banyak petani di daerah lain yang tidak mendapatkan bantuan program Gernas. Padahal, dilihat dari kondisinya, kebun kakao mereka membutuhkan bantuan dari program Gernas. Dengan menurunnya dukungan dana APBN di tahun ini, diharapkan ada tambahan dana bantuan dari pihak lainnya seperti pemda terkait, swasta, NGO, maupun perbankan.

Beralihnya komitmen dan fokus Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada gula merupakan salah satu penyebab berakhirnya program Gernas ini di tahun 2013. Sesuai "Pakta Integritas" antara

Kementerian Pertanian dengan Presiden, Dana APBN dialihkan untuk program swasembada gula. Meskipun tahun ke depan tidak dalam bentuk gernas, dukungan pemerintah pusat terkait program pengembangan kakao akan tetap berlanjut namun dalam ruang lingkup yang lebih kecil dengan anggaran lebih sedikit.

Meskipun hanya 30 % lahan kakao yang tersentuh Gernas, hal tersebut belum mampu menjadi alasan pemerintah untuk melanjutkan program ini. Sementara 70% dari total lahan perkebunan kakao di Indonesia yang sebesar 1,6 juta hektar belum diikutsertakan dalam Gernas masih mengalami kondisi yang memprihatinkan. Padahal, beberapa tahun terakhir, industri kakao domestik berkembang pesat sebagai dampak dari penetapan Bea Keluar Kakao. Dengan bertambahnya jumlah industri kakao domestik, permintaan biji kakao pun meningkat pesat. Berakhirnya program Gernas di tahun ini ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi industri domestik. Mereka khawatir di masa mendatang produksi kakao Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan industri domestik. Jika kondisi ini terjadi, maka Indonesia justru akan menjadi Negara importir biji kakao. Oleh karena itu, diharapkan dengan berakhirnya program Gernas ini, ada keberlanjutan program/peran lebih besar dari pihak Pemerintah Provinsi dan Pemda terkait untuk melanjutkan apa yang telah dirancang dalam program gernas.

II. GERNAS KAKAO MENURUT PERSEPSI STAKEHOLDER NASIONAL

Hasil FGD Nasional dan wawancara mendalam terhadap beberapa *stakeholder* nasional menyatakan bahwa Gernas merupakan program yang berguna bagi keberlangsungan usaha kakao di Indonesia serta bermanfaat besar bagi seluruh pelaku yang terlibat dalam usaha kakao. Program ini juga mendukung

Tabel 1. Perspektif Narasumber Nasional Mengenai GERNAS Kakao

NARASUMBER	PERSPEKTIF MENGENAI GERNAS KAKAO
Sekretaris Gernas Kementerian Pertanian ¹⁾	<p><i>"Meskipun keberhasilan program Gernas membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 1,5 tahun untuk kegiatan rehabilitasi dan 3 tahun untuk peremajaan, namun telah terjadi peningkatan produktivitas pada kebun peserta Gernas. Sesuai dengan hasil evaluasi Bappenas bahwa sebelum dilaksanakan program Gernas, produktivitas kakao di Indonesia rata-rata hanya 400-500 kg/ha/tahun. Setelah adanya program Gernas ini, produktivitas kebun kakao yang diikutsertakan dalam kegiatan intensifikasi dan peremajaan mencapai 1,1 ton/ha/tahun. Bahkan, peningkatan yang signifikan terjadi pada kebun kakao dalam kegiatan rehabilitasi. Hasil dari rehabilitasi tersebut menunjukkan produktivitas kakao menjadi 1,5 ton/ha/tahun. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam waktu tiga tahun kedepan produktivitas dapat lebih meningkat."</i></p>

1) Disampaikan dalam wawancara mendalam (*indept interview*) dengan Heri Moerdianto (Sekretaris Gernas Kementerian Pertanian), Jumat, 12 April 2013.

Direktur PT. Bumi Tangerang ²⁾	"Gernas merupakan kebijakan yang memberikan manfaat besar bagi seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai nilai usaha kakao, mulai dari petani, pedagang, hingga industri. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, penerapan teknik sambung samping dalam program ini berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kakao di Indonesia. Sementara hasil peremajaan dengan menggunakan bibit SE baru dapat dilihat dalam kurun waktu 3 tahun. Meskipun program Gernas baru mencakup 30 % dari total kebun kakao di Indonesia, namun keberhasilan tersebut cukup membantu menjaga produksi kakao sehingga di tahun 2012 kemarin tidak terjadi penurunan yang signifikan."
Kementerian Perdagangan ³⁾	"Gernas merupakan kebijakan untuk merevitalisasi sektor perkebunan komoditas kakao. Lebih dari 95% merupakan perkebunan rakyat dan mayoritas adalah petani gurem. Kondisi tersebut menyebabkan mereka (petani kakao) akan selalu terkendala dengan budidaya kakao (on farm). Meskipun saat ini peningkatan produktivitas kakao belum signifikan, Gernas ini diyakini mampu mendorong peningkatan produktivitas signifikan melalui penggunaan bibit unggul, sambung samping dan pupuk formula khusus. Selain itu, Gernas juga menyediakan fasilitas pelatihan dan pemberdayaan kepada para petani. Hal ini sangat membantu petani dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kelembagaan petani."

cita-cita Indonesia sebagai podusen kakao terbesar di dunia. Gernas merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk memperbaiki dan meremajakan kebun kakao di Indonesia yang sebagian besar berumur tua dan rusak melalui kegiatan utama, yaitu rehabilitasi, peremajaan, dan intensifikasi.

Produktivitas tanaman kakao sebagai salah satu indikator keberhasilan Gernas sudah mulai meningkat, meskipun belum signifikan. Kedepan, jika kebun yang telah dilakukan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan dirawat dengan baik, peningkatan produktivitas yang signifikan akan dirasakan dalam beberapa tahun mendatang.

Pengusahapun sepakat bahwa program Gernas ini sangat membantu industri kakaonya. Terlebih, dengan adanya penetapan bea keluar atas kakao mentah mengakibatkan industri domestik berkembang pesat. Bahkan hingga kini, beberapa industri kakao seperti PT. Bumi Tangerang mendirikan *buyer station* di beberapa daerah sentra produksi kakao. Dengan adanya program ini, jumlah produksi kakao sebagai bahan baku bagi industri domestik meningkat. Tidak hanya itu, kakao yang berasal dari bibit dan klon unggul dengan menggunakan pupuk berformula khusus mampu menghasilkan mutu dan kualitas biji kakao yang lebih baik.

III. PROFIL PELAKSANAAN GERNAS DI MAJENE

Pelaksanaan program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Pro Kakao) di Majene dimulai sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. Dari 12.412 ha areal kebun kakao di Majene pada

tahun 2012, sebanyak 12.130 ha yang diikutsertakan pada program Gernas kakao tahun 2009-2012 di mana perkembangannya setiap tahun adalah: 4.500 ha pada tahun 2009, kemudian 1.400 ha pada tahun 2010, tahun selanjutnya 4.500 ha serta pada tahun 2012 sebanyak 1.730 ha. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih ada 282 ha lahan kebun kakao yang belum tersentuh program Gernas.

Dari tiga kegiatan utama tersebut, rehabilitasi menjadi kegiatan utama dalam program Gernas di Majene. Hal ini karena sebagian kebun kakao Majene berumur kurang dari 15 tahun dan secara teknis dapat dilakukan sambung samping. Di lihat dari lokasinya, program ini menyebar di lima kecamatan sentra produksi kakao di Majene, yakni Kecamatan Sendana, Tammerodo Senadana, Tubo Sendana, Ulumanda dan Malunda. Sementara tiga kecamatan lainnya hanya mendapat porsi yang lebih sedikit. Secara terperinci, perkembangan jumlah luas areal kebun kakao tiap kecamatan di Majene dari tahun 2009 hingga 2012 ditunjukkan oleh Tabel 2 di halaman selanjutnya.

Program ini mempunyai tiga kelompok kegiatan utama: intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan.

3.1. KEGIATAN INTENSIFIKASI

Kegiatan intensifikasi dilakukan untuk tanaman rusak ringan atau kurang terpelihara melalui perbaikan teknik budidaya dan penggunaan input. Penyediaan pupuk, pestisida, bantuan upah tenaga kerja, dan alat pertanian adalah komponen utama kegiatan ini.

Tabel 3 di halaman selanjutnya menunjukkan bahwa wilayah kegiatan intensifikasi Gernas Kakao tahun 2011 menyebar di lima kabupaten sentra produksi

2) Disampaikan dalam wawancara mendalam (*indept interview*) dengan Sindra Gautama (Direktur PT. Bumi Tangerang), Senin 8 April 2013.

3) Disampaikan dalam wawancara mendalam (*indept interview*) dengan Wijayanto (Kasie Ekspor Tanaman Semusim Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan), Kamis 4 April 2013

Tabel 2. Luas Areal Kebun Kakao di Majene dalam Program Gernas Thn 2009-2012 (Hektar)

KECAMATAN	2009			2010			2011			2012		
	P	R	I	P	R	I	P	R	I	P	R	I
Banggae	8	1,76	0,66	2	-	-	49,25	-	0,80	15	-	-
Banggae Timur	20,4	28,88	38,84	10	-	5	114	-	50,70	20	-	300
Pamboang	36,25	39,98	6,17	13	-	5	100	-	10	28	-	-
Sendana	55,02	220,82	79,25	78	70	71	80	155	400	19,50	-	143
Tammerodo Sendana	114,54	766,11	380,73	80	173	50	77	171	397,50	10,50	33	300
Tube Sendana	88,98	845,48	114,38	75	144	32	82,59	71	254	-	20	202
Ulumanda	80	674,1	110	12	68	41	97,16	481,75	405	71	70	275
Malunda	146,81	922,92	269,97	130	245	96	200	721,25	582	36	277	180
Jumlah	500	3000	1000	400	700	300	800	1600	2100	200	400	1130

Sumber: Dinhutbun Majene 2013

Ket: P = Peremajaan
R = Rehabilitasi
I = Intensifikasi

Tabel 3. Wilayah Pengembangan Kakao pada Kegiatan Intensifikasi Program GERNAS Kakao di Kabupaten Majene Tahun 2011

No	KECAMATAN	Luas (ha)	Pupuk (kg)	Mataris (litr)	Upah Kerja (Rp)	Hand Sprayer (buah)	Gunting Galah (buah)
1	Banggae	0,80	256,00	0,64	600.000	-	-
2	Banggae Timur	34,70	11.104,00	27,76	26.025.000	7	36
3	Pamboang	10,00	3,200,00	8,00	7.500.000	2	10
4	Sendana	250,00	80.000,00	200,00	187.500.000	50	250
5	Tammerodo Sendana	247,50	79.200,00	198,00	185.625.000	50	248
6	Tube Sendana	167,00	53.440,00	133,60	125.250.000	33	167
7	Ulumanda	300,00	96.000,00	240,00	225.000.000	60	96
8	Malunda	390,00	124.800,00	312,00	292.500.000	78	390
Jumlah		1.400,00	448.000,00	1.120,00	1.050.000.000	280	1400

Sumber: Dithutbun Majene, 2012

kakao di Kabupaten Majene, yakni Kecamatan Sendana, Tammerodo Sendana, Tube Sendana, Ulumanda dan Malunda. Sementara tiga kecamatan lainnya hanya mendapa porsi yang lebih sedikit.

Berdasarkan Pedoman Teknis Daerah Gernas Kakao 2009-2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, persyaratan kebun yang mengikuti kegiatan intensifikasi antara lain:

- Tanaman masih muda (< 10 tahun) tetapi kurang terpelihara;
- Jumlah regakan/ populasi tanaman >70% dari jumlah standar (1.000 pohon/hektar);
- Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/ha/tahun) dan masih mungkin untuk ditingkatkan;
- Pohon pelindung >20% dari standar;
- Terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Utama (PBK, Helopeltis spp., penyakit VSD dan Busuk Buah).

- Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian, meliputi: curah hujan 1.500 -2.500 mm (sangat sesuai) dan 1.250 -1.500 mm atau 2.500-3.000 (sesuai); Lereng 0-8% (sangat sesuai) dan 8-15% (sesuai).

3.2. KEGIATAN REHABILITASI

Kegiatan rehabilitasi ditunjukan untuk tanaman produktif dengan kondisi rusak sedang melalui teknik sambung samping menggunakan klon unggul. Komponen utama program ini adalah penyediaan entres, pupuk, pestisida, bantuan upah tenaga kerja, dan alat pertanian kecil.

Tabel 4 disamping menunjukkan bahwa bahwa wilayah kegiatan rehabilitasi hanya terpusat di lima kabupaten sentra penghasil kakao, khususnya di Kecamatan Malunda dimana 40% kebun yang

Tabel 4. Wilayah pengembangan kakao pada kegiatan rehabilitasi program Gernas Kakao di Kabupaten Majene tahun 2011

No	KECAMATAN	Luas (ha)	Entres (batang)	Pupuk (kg)	Scorpion (ltr)	Upah Kerja (Rp)	Hand Sprayer (buah)
1	Banggae	-	-	-	-	-	-
2	Banggae Timur	-	-	-	-	-	-
3	Pamboang	-	-	-	-	-	-
4	Sendana	140,00	280.000	26.600,00	42,00	105.000.000,00	28
5	Tammerodo Sendana	112,00	224.000	21.280,00	33,60	84.000.000,00	23
6	Tube Sendana	45,00	90.000	8.550,00	13,50	33.750.000,00	9
7	Ulumanda	181,75	363.500	34.533,00	54,53	136.312.500,00	36
8	Malunda	321,25	642.500	61.037,00	96,38	240.937.500,00	64
Jumlah		800,00	1.600.000	152.000,00	240,00	600.000.000,00	160

Sumber: Dinhutbun 2012

melaksanakan kegiatan rehabilitasi berlokasi di kecamatan ini. Sementara Kecamatan Banggae, Banggae Timur dan Pamboang bukan merupakan wilayah kegiatan rehabilitasi.

Dalam Pedoman Teknis Daerah Gernas Kakap 2009-2011 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, persyaratan kebun yang akan direhabilitasi adalah kebun hamparan dengan kondisi sebagai berikut:

- Umur tanaman masih produktif (umur <15 tahun) dan secara teknis dapat dilakukan sambung samping;
- Jumlah tegakan/populasi tanaman antara 70%-90% dari jumlah standar (1.000 pohon/hektar);
- Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/hektar/tahun) tetapi masih mungkin untuk ditingkatkan;
- Jumlah pohon pelindung >70% dari standar;
- Terserang OPT utama (hama PBK, Helopeltis spp, dan Busuk Buah);
- Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian,

meliputi: curah hujan 1.500-2.500 mm (sangat sesuai) dan 1.250-1.500 atau 2.500-3.000 mm (sesuai); Lereng 0-8% (sangat sesuai) dan 8-15% (sesuai).

3.3. KEGIATAN PEREMAJAAN

Kegiatan peremajaan ditunjukkan untuk tanaman tua atau rusak berat dengan melakukan penggantian tanaman, penguatan dan pengutuhan populasi menggunakan benih klon unggul yang dikembangkan dengan teknik Somatic Embryogenesis (SE). Komponen utama kegiatan ini meliputi penyediaan benih unggul, pupuk, pestisida, bantuan upah tenaga kerja, dan alat pertanian kecil.

Tabel 5 dibawah menunjukkan bahwa Kecamatan Malunda merupakan kecamatan yang paling banyak melaksanakan kegiatan peremajaan dari program Gernas tahun 2011. Sementara Kecamatan Banggae, Tammerodo Sendana dan Tube Sendana merupakan

Tabel 5. Wilayah pengembangan kakao pada kegiatan peremajaan program Gernas Kakao di Kabupaten Majene tahun 2011

No	KECAMATAN	Luas (ha)	Bibit SE (batang)	Pupuk (kg)	Figor (liter)	Scorpion (liter)	Upah Kerja (Rp)	Hand sprayer (buah)	Bibit Tan Sela (kg)
1	Banggae	49,25	49.250	1.970	24,6	9,85	36.937.500	10	739
2	Banggae Timur	114	114.000	4.560	57	22,8	85.500.000	23	1.710
3	Pamboang	100	100.000	4.000	50	20	75.000.000	20	1.500
4	Sendana	80	80.000	3.200	40	16	60.000.000	16	1.200
5	Tammerodo Sendana	77	77.000	3.080	38,5	15,4	57.750.000	15	1.155
6	Tube Sendana	82,59	82.590	3.304	41,3	16,52	61.942.500	17	1.239
7	Ulumanda	97,16	97.160	3.886	48,58	19,43	72.870.000	19	1.457
8	Malunda	200	200.000	8.000	100	40	150.000.000	40	3.000
Jumlah		800	800.000	32.000	400	160	600.000.000	160	12.000

Sumber: Dinhutbun Majene, 2012

kecamatan yang paling sedikit melaksanakan kegiatan ini, mengingat umur pohon kakao di daerah tersebut yang cenderung masih muda.

Persyaratan kebun kakao yang akan diremajakan dalam Pedoman Teknis Daerah Gernas Kaka0 2009-2011 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian adalah kebun hamparan dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Umur tanaman yang sudah tua (umur >25 tahun);
- b) Jumlah tegakan/populasi tanaman <50% dari jumlah standar (1.000 pohon/hektar);
- c) Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/ha/tahun);
- d) Terserang OPT utama (hama PBK dan Helopeltis spp. serta penyakit VSD dan Busuk Buah);
- e) Lahan memenuhi syarat kesesuaian, meliputi: curah hujan 1.500-2.500 mm (sangat sesuai) dan 1.250-1.500 atau 2.500-3.000 mm (sesuai), lereng 0-8% (sangat sesuai) dan 8-15% (sesuai).

Pada ketiga kegiatan utama tersebut, terdapat beberapa paket bantuan yang diberikan, yakni berupa:

a) Pupuk Majemuk (*Compound*) Non Subsidi.

Bantuan pupuk yang diberikan merupakan pupuk majemuk non subsidi dalam bentuk tablet atau briket. Jenis dan dosis pupuk yang dipergunakan merujuk pada hasil rekomendasi Pusat Penelitian Kakao di Jember sehingga pupuk yang diberikan merupakan pupuk yang sesuai dengan jenis dan kualitas tanah di daerah Majene. Pengadaan pupuk dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk kegiatan intensifikasi ini, pada tahun 2011 Kabupaten Majene memperoleh alokasi sebanyak 672.000 kg atau 320 kg/hektar yang diaplikasikan pada awal musim hujan dan telah disalurkan kepada poktan pelaksana kegiatan intensifikasi. Selain itu, Kabupaten Majene juga memperoleh alokasi sebanyak 304.000 kg atau dengan dosis 190 kg/hektar untuk kegiatan rehabilitasi serta 32.000 kg dengan dosis 40 kg/hektar. Kegiatan intensifikasi mendapat dosis pupuk paling tinggi dibanding kegiatan lainnya karena pada kegiatan ini membutuhkan pemupukan yang lebih intensif.

Dengan adanya bantuan pupuk formula khusus ini, petani tidak mengeluarkan biaya dalam kegiatan pemupukan, terlebih kegiatan intensifikasi. Hal ini sangat bermanfaat bagi petani, mengingat pupuk tersebut merupakan pupuk berformula khusus yang sesuai dengan kondisi tanah di Majene sehingga hasilnya diharapkan dapat optimal.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam subsidi pupuk ini. *Pertama*, tidak ada keberlanjutan pupuk berformula khusus, Kendala yang muncul di masa

mendatang adalah kesulitan petani dalam membeli pupuk majemuk non subsidi mengingat pupuk dengan formula khusus tersebut tidak diperjual beli secara bebas di pasar. Pabrik yang mendapatkan tender untuk memproduksi pupuk tersebut harus mendapatkan izin resmi dari Kementerian Pertanian.

Kedua, keterlambatan dalam distribusi pupuk sebagai akibat dari ketidaksinkronan dan kurangnya koordinasi antar pemerintah kabupaten dengan provinsi. Seperti yang tertuang dalam petunjuk teknis Gernas, pengadaan pupuk dilaksanakan di Dinas Perkebunan Provinsi. Sementara program secara umum dilaksanakan di tingkat kabupaten. Sesungguhnya pelaksanaan pengadaan tersebut dapat berjalan lancar jika ada koordinasi antara provinsi dengan kabupaten. Namun, kenyataannya di lapangan koordinasi tersebut jarang dilakukan. Akibatnya, ketika hari pelaksanaan program rehabilitasi, intensifikasi maupun peremajaan, bantuan pupuk yang dibutuhkan belum datang. Pada akhirnya, ini dapat menghambat jadwal pelaksanaan program gernas.

Ketiga, cakupan wilayah distribusi pupuk. Menurut salah satu narasumber dalam FGD yang dilaksanakan di Majene.

“Perbedaan biaya transportasi untuk mencapai wilayah pesisir dengan wilayah dataran tinggi di Majene menjadi kendala dalam distribusi pupuk. Biaya transportasi untuk distribusi ke wilayah dataran tinggi jauh lebih besar ketimbang ke wilayah pesisir, namun, biaya transportasinya justru disamakan. Akibatnya, penyaluran pupuk untuk di dataran tinggi kurang maksimal. Misalnya, pupuk yang seharusnya diberikan untuk wilayah pesisir sebesar satu ton, namun yang didistribusikan hanya 800 kg. Selisih 200 kg digunakan untuk mengganti biaya transportasi untuk mencapai wilayah tersebut.”

b) Pengadaan Peralatan

Jenis peralatan yang diadakan pada kegiatan intensifikasi adalah alat semprot (*handsprayer*) dan gunting galah. Pengadaan *handsprayer* dan gunting galah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk kegiatan intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan, bantuan *handsprayer* ini diberikan adalah 1 (satu) buah tiap lima hektar. Sementara gunting galah yang diberikan adalah 1 (satu) buah tiap hektar lahan kakao. Bantuan peralatan ini membantu petani dalam merawat kebun kakao. Alat semprot (*handsprayer*) digunakan petani untuk menyemprot pestisida dan gunting galah digunakan untuk memotong batang/cabang pohon kakao sesuai standar teknis budidaya. Pemberian peralatan secara gratis ini dapat menghemat biaya yang dikeluarkan petani dalam berkebun, sehingga keuntungan yang

yang diperoleh petani meningkat.

Sayangnya, manfaat dari bantuan tersebut tidak dapat diterima oleh semua petani mengingat jumlah bantuan peralatan tersebut tidak proporsional. Satu buah *handsprayer* untuk 5 hektar kebun. Artinya setiap poktan yang beranggota 25 petani hanya mendapat 6 buah *handspray*. Jumlah bantuan *handspray* yang tidak sebanding dengan jumlah petani (6 buah *handspray* untuk 25 petani) dapat mempersulit petani dalam menggunakan alat tersebut. Bahkan, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena para petani anggota poktan menganggap bahwa yang mendapatkan bantuan alat tersebut hanyalah ketua poktan atau pengurus poktan. Sedangkan anggota poktan yang kurang aktif tidak diberi kesempatan untuk menggunakannya.

Begitu pula dengan bantuan alat produksi yang berupa gunting galah yang sangat bermanfaat untuk pemangkasan kebun kakao. Jumlah gunting galah yang diberikan hanyalah 1 buah untuk 1 hektar kebun kakao. Jika setiap petani hanya memiliki 0,5 hektar kebun, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan karena satu buah gunting galah dimanfaatkan oleh 2 (dua) petani.

c) Pestisida

Pestisida yang digunakan adalah jenis pestisida yang efektif, efisien, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran yang pemilihannya didasarkan pada hasil pengamatan serangan hama dan penyakit. Pengadaan pestisida dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam kegiatan intensifikasi, Kabupaten Majene pada tahun 2011 memperoleh alokasi sebanyak 1.680 liter. Jenis pestisida yang diterima dari provinsi berupa pestisida dengan merk 'Matarin' dengan dosis 0,80 liter/hektar. Sementara itu, dalam kegiatan rehabilitasi Kabupaten Majene memperoleh alokasi sebanyak 480 liter berupa pestisida dengan merk 'Scorpion' dengan dosis 0,30 liter/hektar. Kabupaten Majene dalam kegiatan intensifikasi juga memperoleh alokasi pestisida sebanyak 560 liter berupa dua jenis pestisida dengan merk 'Vigor' sebanyak 400 liter dengan dosis 0,50 liter/hektar dan merk 'Scorpion' sebanyak 160 liter dengan dosis 0,2 liter per hektar.

Pestisida ini sangat berguna bagi petani dalam mencegah serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Hasilnya, kebun yang terserang OPT menurun sebesar 21 persen (lihat Tabel 5 dihalaman sebelumnya). Sayangnya, pemberian pestisida tersebut belum diimbangi dengan pembinaan pembuatan pupuk nabati, mengingat penggunaan pestisida kimia yang bila terus menerus dalam penggunaannya dapat menurunkan kualitas tanaman maupun lahan.

d) Bantuan Upah Kerja

Disamping bantuan yang berupa fisik, bantuan juga diberikan dalam bentuk upah kerja. Upah kerja diberikan kepada petani melalui poktan untuk pemeliharaan (pemangkasan) tanaman sebesar Rp 750.000,00 per hektar. Bantuan upah kerja tersebut diserahkan melalui rekening tabungan poktan sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan petani.

Bantuan upah kerja ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah agar petani merawat kebun kakao. Tanpa adanya insentif ini, petani cenderung malas untuk melakukan perawatan. Padahal, perawatan dan pemeliharaan kebun merupakan salah satu kunci keberhasilan berkebun kakao. Dengan demikian, bantuan ini dapat meningkatkan niat petani untuk merawat kebun serta menambah penghasilan bagi petani.

e) Entres dan sambung samping

Entres merupakan bahan tanam yang digunakan untuk sambung samping. Pengadaan entres ini hanya dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi. Pada tahun 2011, Kabupaten Majene menerima 3.200.000 sambungan untuk 1.600 hektar atau sekitar 2.000/hektar.

Sambung samping merupakan salah satu teknik untuk menyambung bagian dari pohon dengan klon unggul. Teknik tersebut dapat memperbaiki kebun kakao yang rusak dan berumur tua tanpa menebang seluruh pohon. Karena berasal dari klon unggul, buah kakao yang dihasilkan pun menjadi lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik.

f) Benih dan Tanaman

Pada kegiatan peremajaan, tanaman kakao yang sudah berusia di atas 25 tahun dibongkar dan ditanami bibit SE dari Pusat Penelitian Kakao Jember, Jawa Timur. Sebagai tanaman pengganti diberikan bantuan benih tanaman sel berupa jagung hibrida. Alokasi benih SE yang diberikan pada tahun 2011 sebanyak 800.000 batang/pohon dengan perbandingan 1.000 batang per pohon per hektar. Sementara pengadaan benih tanaman sela berupa jagung hibrida dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene. Bantuan benih jagung hibrida ini sebanyak 12.000 kg dengan rasio 15 kg/hektar.

Benih kakao merupakan benih unggul yang diperbanyak dengan rekayasa genetika secara somatic embryogenesis (SE). Dengan demikian, kakao yang dihasilkan dari benih tersebut memiliki mutu dan kualitas yang lebih baik dengan jumlah yang lebih banyak. Hal ini sangat membantu petani karena kebun kakao di Majene rata-rata berumur tua sehingga membutuhkan penggantian tanaman.

Disamping itu, bibit tanaman sela yang diberikan juga sangat berguna karena hasil tanaman sela tersebut menjadi penghasil bagi petani selama benih SE belum berbuah.

Subsidi benih tersebut tidak terlepas dari kendala dalam implementasinya. Tidak sedikit benih yang mati dalam distribusi atau dalam pembesaran yang dilakukan oleh pemda provinsi. Beberapa faktor yang mengakibatkan matinya benih dalam bentuk planlet adalah sebagai berikut:

1. Proses pengiriman yang melebihi waktu kritis benih yang diharuskan sehingga benih mati di jalan. Masa kritis benih dalam planlet tersebut

adalah 5-7 hari. Terkadang, pengiriman ini terhambat karena buruknya infrastruktur dan transportasi.

2. Pengemasan planlet benih tidak mengikuti ketentuan/standar yang berlaku. Misalnya, seharusnya satu rak berisi 1.500 planlet, namun pada praktiknya planlet benih dalam satu rak ditumpuk melebihi ketentuan (3.000 planlet) sehingga bibit banyak yang rusak dan mati.
3. Bibit mati karena tenaga pendamping yang ditugaskan kurang terampil sehingga penanganan bibit tidak sesuai pedoman teknis daerah Gernas kakao yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.

Tabel 6. Mata Rantai (*Impact Chain*) dan Kendala Paket Bantuan Kegiatan Intensifikasi, Rehabilitasi dan Peremajaan GERNAS Kakao

AKTIVITAS	OUTPUT	USE OF OUTPUT	IMPACT	HIGHLY IMPACT	KENDALA
Pengadaan Pupuk majemuk (compound) non subsidi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pupuk yang sesuai dengan jenis tanah • Biaya produksi berkurang 	Optimalisasi penggunaan pupuk formula khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas kakao • Meningkatkan mutu dan kualitas kakao • Meningkatnya keuntungan (margin) produksi yang diterima petani 	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Majene	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada keberlanjutan pupuk berformula khusus • keterlambatan dalam distribusi pupuk • Minimnya biaya transportasi dalam distribusi pupuk
Pengadaan peralatan (gunting galah dan <i>handsprayer</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun lebih terawat • Biaya produksi berkurang 	Optimalisasi dalam penggunaan peralatan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas kakao • Meningkatkan mutu dan kualitas kakao 		Jumlah bantuan peralatan tersebut tidak proporsional menyebabkan penggunaan peralatan tidak efektif
Pengadaan Pestisida	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pestisida yang sesuai dengan jenis serangan hama dan penyakit • Biaya produksi berkurang 	Optimalisasi dalam penggunaan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya serangan hama dan penyakit • Meningkatkan produktivitas kakao 		Penggunaan pestisida dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas tanaman
Pemberian bantuan upah kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Upah Rp 75.000 per hektar 	---	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan insentif bagi petani untuk merawat kebun • Menambah pendapatan petani 		---

AKTIVITAS	OUTPUT	USE OF OUTPUT	IMPACT	HIGHLY IMPACT	KENDALA
Pengadaan entres	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik sambung samping dengan klon unggul pada tanaman rusak dan berumur tua 	Optimalisasi penggunaan teknik sambung samping, pemberian pupuk dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas kakao • Meningkatkan kualitas kakao • Meningkatkan pendapatan petani kakao 	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Majene	---
Pengadaan benih dan tanaman sela	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan benih unggul 	Optimalisasi bibit unggul, pemberian pupuk dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas kakao • Meningkatkan kualitas kakao • Meningkatkan pendapatan petani 		Tidak sedikit benih yang mati dalam distribusi atau dalam pembesaran yang dilakukan oleh pemda provinsi

3.4. PENGEMBANGAN KAPASITAS PETANI

Secara umum, permasalahan utama dalam SDM kakao adalah kurangnya motivasi memelihara kebun, kurangnya motivasi dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan, serta pengetahuan standar kualitas dan harga yang masih rendah. Hingga kini masih banyak petani yang malas untuk merawat kebun kakao mereka. Padahal, perawatan kebun merupakan syarat utama keberhasilan berkebun kakao.

Salah satu kegiatan di dalam program GERNAS adalah kegiatan pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam mengelola usaha kakaonya. Pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.

Pada prinsipnya, kegiatan ini sangat penting dalam mengembangkan kapasitas petani. Dengan bertambahnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani yang didapat dari kegiatan ini berguna untuk diimplementasikan di kebun sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam merawat kebunnya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan produktivitas kebun kakao. Namun, jumlah peserta pelatihan pemberdayaan petani masih sangat sedikit. Di tahun 2009, ada 253 orang dari 2.832 petani. Artinya 8,9% petani yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahkan di tahun 2012, proporsi petani yang mendapat pelatihan tersebut menurun menjadi 2,7%, dimana dari 12.289 dari total petani kakao, hanya 282 petani yang mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut (Dishutbun 2013). Dengan demikian, program pelatihan ini belum sepenuhnya efektif mengingat peserta pelatihan yang masih sangat minim, yakni di bawah 9% dari total petani kakao di Majene.

Di samping kegiatan pelatihan, kegiatan

pendampingan lapangan juga dilakukan untuk mendukung keberhasilan program Gernas. Sayangnya, Kabupaten Majene hanya menyediakan sekitar 50 tenaga pendamping untuk membantu mensukseskan program Gernas di Majene. Dari jumlah tersebut, terdiri dari petugas pendamping pihak ketiga, petugas lapangan serta tim teknis lapangan. Dengan latar belakang tenaga pendamping yang berbeda-beda, tidak semua tenaga pendamping memiliki pengetahuan tentang kakao sehingga kinerja tenaga pendamping dalam program Gernas ini masih belum optimal. Latar belakang penyuluh tidak semua berasal dari pertanian. Tidak sedikit dari mereka yang berlatar belakang pendidikan peternakan, kehutanan dan perikanan. Terlebih, masih ada penyuluh yang berpendidikan setingkat SMA. Akibatnya, mereka kurang memahami masalah kakao hingga ke teknis.

Di samping dari sisi kualitas, jumlah penyuluh juga masih sangat terbatas.. Kenyataannya di lapangan tidak jarang ditemukan penyuluh menangani lebih dari satu desa. Akibatnya penyuluh tersebut belum mampu menjangkau semua petani dan jadwal kunjungan ke petani semakin sedikit. Selain itu, beberapa penyuluh merupakan tenaga kontrak dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program Gernas. Artinya, setelah program Gernas berakhir, kontrak tenaga penyuluh tersebut juga berakhir. Hal ini tentu dapat mengurangi jumlah penyuluh di lapangan.

3.5. PEMBANGUNAN UNIT PENGOLAHAN HASIL

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas kakao, dilaksanakan pembangunan satu Unit Pengolahan Hasil (UPH) setiap tahun beserta sarana pendukungnya. Dari tahun 2010 hingga 2012, terdapat tiga UPH yang telah dibangun, yakni UPH Sangiang di Kecamatan Sendana yang dibangun tahun 2010,

Tabel 7. Mata Rantai (*Impact Chain*) dan Kendala Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petani GERNAS Kakao

AKTIVITAS	OUTPUT	USE OF OUTPUT	IMPACT	HIGHLY IMPACT	KENDALA
<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan • Sosialisasi • Pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani 	Komunikasi yang lebih baik antara penyuluh dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas kakao • Meningkatkan kualitas kakao • Meningkatkan pendapatan petani 	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Majene	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah peserta pelatihan yang masih terbatas • Jumlah tenaga pendamping yang terbatas • Rendahnya kualitas tenaga pendamping

UPH Kanrubi di Kecamatan Tammerodo Sendana yang dibangun tahun 2011 dan UPH Bukit Harapan di Kecamatan Malunda yang dibangun pada tahun 2012. Selain pembangunan gedung, sara pendukung yang diberikan adalah kotak fermentasi, mesin pengering, alat ukur kadar air, timbangan duduk dan bantuan modal. Khusus untuk bantuan modal yang diberikan berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2011, tercatat bantuan modal yang diberikan untuk pengelolaan UPH adalah sebesar RP 192.600.000.

Adanya UPH ini dimaksudkan untuk membantu petani dalam meningkatkan mutu dan kualitas biji kakao dimana mereka dapat melakukan fermentasi dan tidak lagi menjual kakao yang dikeringkan saja. Selain itu, pada saat musim hujan, peran UPH juga dapat dioptimalkan karena di UPH tersedia mesin pengeringan. Meskipun mesin pengeringan ini juga dapat mengurangi cita rasa dan aroma biji kakao dan membutuhkan kayu dalam jumlah besar sebagai bahan bakar. Oleh karena itu, mesin ini hanya digunakan dalam keadaan sangat mendesak seperti musim hujan. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada UPH juga sangat berguna bagi petani. Dari modal tersebut, petani dapat mengakses pinjaman

(kredit modal) berupa uang maupun saprodi, seperti pupuk, pestisida dan alat-alat perkebunan. Biasanya mereka akan mengembalikan kredit tersebut pada musim panen.

Dampak adanya UPH bagi petani memang terlihat membantu, terutama dalam pengolahan biji kakao. Namun, pembangunan UPH yang hingga kini berjumlah 3 unit di tiga kecamatan sentra kakao masih dirasa kurang untuk menampung produksi petani di tiga kecamatan tersebut. Terlebih, medan yang sulit ditempuh dan wilayah per kecamatan yang luas semakin menyulitkan petani untuk menjual biji kakaonya ke UPH. Petani cenderung lebih memilih menjual kepada pedagang yang langsung datang ke rumah petani ketimbang harus berjalan mengantarkan biji kakaonya ke UPH.

Di samping itu, tujuan UPH untuk menguatkan kelembagaan petani belum sepenuhnya tercapai. Hingga kini petani masih belum merasakan keberadaan UPH sebagai suatu lembaga yang bisa menyatukan petani sehingga posisi tawar petani dapat meningkat. Peran Pemda pun baru sebatas menyediakan UPH. Belum terlihat adanya upaya

Tabel 8. Mata Rantai (*Impact Chain*) dan Kendala Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petani GERNAS Kakao

AKTIVITAS	OUTPUT	USE OF OUTPUT	IMPACT	HIGHLY IMPACT	KENDALA
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung • Pengadaan sarana pendukung (kotak fermentasi, mesin pengering, dll) • Bantuan modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penampungan (pengumpulan) biji kakao para petani • Tempat pengeringan biji kakao • Penyediaan sarana produksi secara kredit 	Komunikasi yang lebih baik antara pengurus UPH dengan petani	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu dan kualitas biji kakao • Meningkatkan harga jual biji kakao • Memutus mata rantai nilai kakao di Majene • Memperkuat kelembagaan dan posisi tawar petani kakao 	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Majene	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah UPH masih terbatas sehingga belum mampu menampung seluruh hasil produksi dari para petani

lain dalam mencoba mendorong produk olahan berupa fermentasi, seperti regulasi terkait biji kakao fermentasi dan upaya peningkatan kapasitas UPH dalam melakukan fermentasi biji kakao agar dapat menerima pasokan biji kakao yang lebih besar lagi dari petani. Hal ini dibutuhkan agar manfaat yang dihasilkan dari pembangunan UPH dapat optimal.

3.6. KEGIATAN LAIN DALAM GERNAS

Selain kegiatan yang dijelaskan sebelumnya, program ini mempunyai beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya target Gernas. Beberapa diantaranya adalah:

- Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan revitalisasi kakao**
Kegiatan ini berupa koordinasi, pertemuan evaluasi dan penyusunan laporan. Koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan agar mencegah adanya kesalahan di lapangan. Sebelum menyusun laporan, dilakukan pertemuan evaluasi dari setiap kegiatan Gernas dimana membahas implementasi kegiatan di lapangan serta hasilnya. Selanjutnya dibuat laporan hasil Gernas Kakao pada TA tersebut. Hingga kini, laporan yang telah selesai dibuat oleh Pemda Majene adalah Laporan Evaluasi Gernas Kakao Tahun 2011.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung.**
Tenaga pendamping merupakan salah satu aktor yang menentukan keberhasilan Gernas. Mengingat luasnya daerah Majene dan infrastruktur yang kurang baik, kendaraan bermotor sangat mendukung aktifitas tenaga pendamping untuk menjangkau petani khususnya yang berada di daerah pedalaman. Oleh karena itu, pada Gernas terdapat kegiatan pemeliharaan dan prasarana pendukung yang salah satunya berupa penyediaan fasilitas bermotor tersebut.
- Pengawasan, pendampingan, sinkronisasi, koordinasi, monev pelaksanaan.**
Kegiatan ini terdiri dari dua yaitu: pengawasan kegiatan dan pengembangan sistem data base kakao. Pengawasan kegiatan dilakukan untuk mengawasi dan mengawal jalannya kegiatan utama (intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan) yang dilakukan oleh Dinhutbun. Dengan adanya

pengawasan tersebut, kegiatan utama gernas dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. System data base kakao belum selesai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh pengumpulan data yang belum semua terkumpul.

IV. CAPAIAN PROGRAM GERNAS KAKAO DI KABUPATEN MAJENE

Dalam kurun waktu 2008-2011, terdapat peningkatan yang cukup besar dalam hal total produksi, produktifitas, tenaga kerja dan pendapatan petani. Total produksi kakao pun meningkat dari 5.717 ton pada tahun 2008 menjadi 9.024 ton pada tahun 2011. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 yakni kakao meningkat sebesar 2.615 ton. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi yang signifikan dapat dirasakan mulai tahun 2011 ini. Dilihat dari produktifitas, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan peningkatan sebesar 157.4 ton/hektar. Secara umum, program Gernas periode 2009-2011 mampu meningkatkan produksi kakao sebesar 58% dan produktifitas sebesar 55%. Tidak hanya itu, pendapatan petani meningkat jumlah petani pun meningkat sebesar Rp 2.716.319 selama tahun 2008 hingga 2011. Peningkatan pendapatan tersebut menjadi insentif bagi petani untuk berkebun kakao sehingga jumlah petani pun meningkat. Pada tahun 2008, terdapat 7.711 KK yang ikut dalam usaha kakao meningkat sebesar 33,3% menjadi 10.289 KK pada tahun 2011.

Jika dilihat dari mutu pertanaman, terjadi penurunan luas serangan OPT yang cukup besar. Di tahun 2008 sebelum pelaksanaan Gernas, sebesar 10.177 ha kebun kakao terserang hama atau sebesar 92% dari total luas areal kakao di Majene. Sementara pada tahun 2011, luas kebun kakao yang terserang menurun menjadi 8.786,20 ha atau sebesar 71% dari total luas areal kakao. Sementara penggunaan bibit unggul meningkat tajam yang awalnya hanya 7,19% di tahun 2008 menjadi 60,62% pada tahun 2011.

Secara rinci, capaian progam Gernas Kakao di Majene berdasarkan enam indikator, yakni luas areal, produktifitas, produksi, tenaga kerja, pendapatan petani dan mutu pertanaman dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Capaian Program Gernas di Majene dari tahun 2008-2011

NO	INDIKASI	SATUAN	2008	2009	2010	2011
1	Luas Areal	Ha	11.094	11.101	11.251	12.412
2	Produktifitas	Kg/Ha	568	569.6	727	880
3	Produksi	Ton	5.717	6.312	6.409	9.024
4	Tenaga Kerja	KK	7.711	8.832	8.832	10.289
5	Pendapatan Petani	Rp/Tahun	14.823.811	16.371.003	16.624.978	17.540.130

Lanjutan Tabel 9.						
NO	INDIKASI	SATUAN	2008	2009	2010	2011
6	Mutu Pertanaman					
	a. Jumlah Populasi Tanaman	Pohon/Ha	1.100	1.000	1.000	1.000
	b. Luas Serangan OPT	Ha	10.177	9.800	9.120	8.786,20
	c. Penggunaan Bibit Unggul	%	7,19	31,5	41,28	60,62

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Keterlambatan distribusi sarana produksi baik pupuk maupun benih dapat menghambat keberhasilan program Gernas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi khususnya pada kegiatan utama Gernas. Pemkab perlu mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan pemupukan pada kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kepada pemprov sehingga tidak terjadi keterlambatan distribusi pupuk. Begitu pula dengan pembagian benih. Koordinasi puslit koka di Jember dengan Pemprov sangat dibutuhkan terkait waktu pengiriman benih dan tata cara pembesaran benih oleh Pemprov.

Peningkatan Dukungan Pemda dalam penguatan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Dengan latar belakang PPL yang berbeda-beda, tidak semua PPL memiliki pengetahuan dan keahlian tentang kakao. Akibatnya petani masih menghadapi berbagai kendala dalam berkebun. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari pemda dalam kualitas dan kuantitas PPL di Majene. Dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan petani, perlu peningkatan kapasitas PPL melalui pelatihan secara intensif dan berkala. Tidak hanya itu, jumlah PPL juga harus ditingkatkan agar PPL mampu menjangkau seluruh petani. Selain itu, koordinasi tenaga pendamping teknis dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BKP4) perlu ditingkatkan agar seluruh PPL dapat terkoordinasi dengan baik.

Koordinasi Pemda agar petani mampu mengakses pupuk berformula khusus.

Pupuk formula khusus merupakan pupuk subsidi Gernas yang berasal dari hasil analisis tanah dan daun yang dihasilkan dari Puslit Koka. Karena kekhususan dalam formulanya, pupuk ini tidak dijual secara bebas di pasar. Dengan berakhirnya program Gernas, berakhir pula subsidi pupuk yang diberikan.

Ini menandakan bahwa petani tidak dapat mengakses pupuk berformula khusus tersebut sehingga produktivitas kebun kakao mereka kurang optimal. Sebenarnya pupuk formula khusus ini dapat tetap di produksi di semua pabrik jika ada permintaan dari petani. Oleh karena itu, peran pemda sangat dibutuhkan untuk menguatkan kelembagaan atau kelompok petani sehingga pabrik tersebut bersedia memproduksi dengan skala tertentu. Dalam hal ini, Pemda melalui Dinas Perkebunan dapat mengkoordinasi pemesanan pupuk tersebut kepada pabrik. Solusi tersebut dapat diterima oleh Kadishutbun Majene⁴⁾. Pihaknya menawarkan solusi bahwa ke depan mereka akan bekerjasama dengan Universitas untuk menganalisis jenis tanah dan pupuk yang sesuai dengan tanah di Majene. Hasilnya, Dinhutbun akan menawarkan ke pabrik untuk memproduksi pupuk tersebut serta mengkoordinasi para poktan dalam pembelian pupuk.

Keberhasilan penguatan kelembagaan petani dalam pembelian pupuk tersebut sudah dibuktikan di Sulawesi Tenggara. Melalui lembaga ekonomi masyarakat mandiri (LEMM) dengan pendekatan desa, didirikan koperasi yang mampu mengakses ke pabrik untuk memproduksi pupuk formula khusus. Hal ini dapat dijadikan contoh baik untuk diterapkan di daerah lain.

Peningkatan kapasitas petani oleh Pemda

Seperti yang diketahui bahwa sebagian besar petani kakao masih kurang sadar untuk merawat kebunnya. Peran pemda sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelembagaan petani melalui pelatihan dan pemberdayaan petani. Hal ini masih sangat diperlukan agar petani mempunyai kesadaran dan keahlian dalam merawat kebun. Tidak hanya itu, penguatan kelembagaan pun ditujukan agar petani mempunyai kesadaran untuk terlibat aktif dalam kelembagaan petani seperti UPH maupun poktan sehingga posisi tawar petani dapat meningkat.

Jumlah peserta pelatihan pun harus diperhatikan oleh Pemda. Jika peserta yang diikutsertakan dalam pelatihan sedikit, kegiatan tersebut tidak membawa dampak yang signifikan. Oleh karena itu, pemda perlu menambah jumlah peserta pelatihan. Di samping itu,

4) Dalam Focus Group Discussion "Pengembangan Iklim Usaha bagi Peningkatan Rantai Nilai Usaha Kakao Kabupaten Majene" yang diselenggarakan di Majene, 14 Februari 2013

pemda perlu menarik minat petani dengan insentif khusus agar petani bersedia mengikuti pelatihan dan menerapkannya di kebun mereka.

Pembentukan stakeholder forum sebagai upaya peningkatan kelembagaan

Salah satu permasalahan mendasar dalam Gernas ini adalah tidak adanya forum stakeholder kakao yang mempertemukan semua aktor yang berkepentingan dalam komoditas kakao. Tidak adanya forum ini mengakibatkan ketidaksinkronan antar pihak dalam upaya pengembangan kakao. Misalnya, pemda menyediakan dana revitalisasi untuk para petani kakao dengan bunga rendah. Namun, masih banyak petani kakao yang belum memahami proses peminjaman dana revitalisasi tersebut karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan maupun pemda mengenai dana tersebut.

Dengan pembentukan forum ini, diharapkan semua pihak terkait kakao dapat berkumpul untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kakao. Selain itu, dari forum tersebut, dapat dirumuskan bentuk kemitraan yang menguntungkan bagi para stakeholder.

Keberlanjutan pelaksanaan Gernas oleh Pemda

Tidak dapat dihindari bahwa Gernas akan berakhir

tahun ini. Meskipun direncanakan program lain sebagai pengganti Gernas, namun program tersebut tidak semasih Gernas dengan anggaran yang jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, ke depan pemprov dan pemkab harus lebih berpihak dan berkomitmen kuat untuk melanjutkan program Gernas di daerahnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Narasumber dari Kementerian Pertanian⁵⁾, program Gernas seyogyanya merupakan stimulus dari pemerintah pusat agar pemda lebih memperhatikan kakao yang menjadi komoditas utama daerahnya. Setelah stimulus ini selesai dilakukan, Pemda seharusnya dapat melanjutkan program Gernas ini meskipun dalam bentuk lain, misal Gerakan Daerah (Gerda) pro kakao.

Sangat disayangkan apabila program Gernas tidak dilanjutkan oleh pemda. Kebun kakao seluas 450.000 ha di seluruh Indonesia khususnya 12.130 ha di Majene akan sia-sia jika tidak ada bantuan dari Pemda kepada petani untuk merawat kebunnya. Terlebih, apabila kebun kakao tersebut beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Program dari pemda untuk melanjutkan Gernas ini sebaiknya berfokus pada peningkatan bantuan sarana produksi serta program pemberdayaan kepada petani. Dengan program ini, diharapkan petani dapat merawat kebun dengan lebih baik agar hasil dari program Gernas lebih optimal dan dapat dirasakan di tahun-tahun mendatang. ■

5) *Focus Group Discussion* Nasional, "Pengembangan Iklim Usaha bagi Peningkatan Rantai Nilai Usaha Kakao Kabupaten Majene" yang diselenggarakan di Jakarta, 25 April 2013

Lampiran I. Matriks Peran *Stakeholder* GERNAS Kakao Majene

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM GERNAS	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
Kementerian RI (Dirjen Perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan anggaran untuk program Gernas • Mengkoordinasikan pelaksanaan program Gernas dengan pemda provinsi maupun kabupaten • Menyediakan tenaga penyuluh kontrak untuk membantu melancarkan program Gernas • Melakukan pengawasan atas jalannya program Gernas 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan program yang bertujuan untuk meningkatkan komoditas kakao • Meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam program pengembangan komoditas kakao
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengadaan pupuk formula khusus • Melakukan pengadaan pestisida • Melakukan pembesaran bibit SE • Memberikan anggaran untuk biaya transportasi penyuluh sebesar RP 125.000/bulan/penyuluh • Bersama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten melakukan sosialisasi program Gernas 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan program Gernas di daerah untuk program pengembangan komoditas kakao • Memberi dukungan anggaran lebih untuk para penyuluh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengadaan peralatan (handsprayer dan gunting galah) • Melakukan pengadaan entres bekerjasama dengan perusahaan penakar benih • Menyalurkan upah kerja kepada para petani • Memberikan anggaran untuk operasional penyuluh • Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada penyuluh • Bersama dengan Dinas Perkebunan Provinsi melakukan sosialisasi program Gernas • Melakukan seleksi calon petani peserta 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan program Gernas di daerah untuk program pengembangan komoditas kakao • Berkerjasama dengan BKP4 menambah jumlah petugas penyuluh • Menyelenggarakan program pembinaan kepada petani secara intensif dengan jumlah petani yang lebih banyak • Mengkoordinasikan para petani agar mampu mengakses pupuk formula khusus
Petani	<p>a) Melakukan kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan</p> <p>b) Melakukan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan penyuluhan</p> <p>Kegiatan Intensifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman pohon pelindung • Pemangkasan • Sanitasi kebun kakao • Pemupukan (satu kali dilakukan pada awal musim tanam) • Aplikasi pestisida <p>Kegiatan Rehabilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sambung samping • Penanaman pohon pelindung • Pemupukan (satu kali dilakukan pada awal musim tanam) 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeliharaan dan perawatan yang intensif agar keberhasilan Gernas lebih bisa dirasakan • Lebih berperan aktif dalam kegiatan pengembangan kapasitas petani seperti sosialisasi, pembinaan dan pelatihan

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM GERNAS	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
Petani	Kegiatan Peremajaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembongkaran/penebangan pohon kakao • Penanaman pohon pelindung • Pembuatan anjir dan lubang tanaman • Pemupukan (satu kali dilakukan pada awal musim tanam) • Penanaman bibit kakao • Penanaman tanaman sela • Aplikasi pestisida 	
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Majene (BKP4)	Mendukung program Gernas Kakao melalui penyediaan tenaga pelaksana penyuluh pertanian (PPL)	Menambah jumlah dan meningkatkan kapasitas penyuluh
Penyuluh	Memberikan penyuluhan, pendampingan dan pembinaan kepada petani	Memberikan pendampingan dan pembinaan secara lebih intensif
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslit Koka)	<ul style="list-style-type: none"> • Perbanyak benih dengan teknologi • Somatic Embryogenesis (SE) • Melakukan analisis kualitas tanah untuk menentukan jenis pupuk formula khusus 	Melakukan penelitian terkait kakao





FORDFOUNDATION

*Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch*

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Phone: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643